

SUKARNO,

Marxisme, dan Bahaya Pemfosilan

Airlangga Pribadi Kusman

Benedict Anderson

Bonnie Setiawan

Mastono

Max Lane

Rudi Hartono



Kata Pengantar: Bonnie Triyana

INDO|PROGRESS

SUKARNO, MARXISME dan BAHAYA PEMFOSILAN

Airlangga Pribadi Kusman

Benedict Anderson

Bonnie Setiawan

Mastono

Max Lane

Rudi Hartono

Kata Pengantar: Bonnie Triyana



Judul: Sukarno, Marxisme, dan Bahaya Pemfosilan

Editor: Coen Husain Pontoh

Desain Sampul dan isi: Alit Ambara

Diterbitkan oleh Pustaka IndoPROGRESS, 2016

Penerbit: IndoPROGRESS, 2016

Daftar Isi:

Kata Pengantar **1**

- I. *Bonnie Setiawan* **Sukarno Itu Kiri Marxis** **9**
- II. *Rudi Hartono* **Bung Karno dan Marxisme** **14**
- III. *Airlangga Pribadi Kusman* **Menggugat Sukarno dan Sejarah Yang Belok Kanan** **23**
- IV. *Max Lane* **Sukarno yang (Di)Kalah(kan) Total** **27**
- V. *Mastono* **Penghianatan Marhaenis Terhadap Marhaenisme: Sebuah Kesaksian** **33**
- VI. *Ben Anderson* **Bung Karno dan Bahaya Pemfosilan** **42**

Biodata Penulis **66**

Kata Pengantar

Bung Karno, Seorang Revolusioner yang Inklusif

Bonnie Triyana

PADA suatu hari, datanglah delegasi dari Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) ke Presiden Sukarno. Mereka menyampaikan maksud untuk membangun patung Multatuli alias Eduard Douwes Dekker penulis roman *Max Havelaar* yang masyhur itu. Tanpa diduga Bung Karno malah balik bertanya, “Kenapa Multatuli? Kenapa bukan patung Henk Sneevliet saja?”

Tak jelas kelanjutan cerita itu sampai di mana. Beberapa pegiat Lekra memang berafiliasi dengan akademi sastra Multatuli. Apakah patung tersebut hendak didirikan berkaitan dengan akademi sastra Multatuli? Entahlah. Satu yang pasti, usulan tersebut agaknya tak pernah terwujud dan lagipula, sampai hari ini, tak pernah kita temukan di mana patung Multatuli itu berada. Begitu pula dengan patung Henk Sneevliet, gagasan Presiden Sukarno.

Anjuran membangun patung Henk Sneevliet ketimbang patung Multatuli tak berarti Bung Karno sedang menempatkan Sneevliet lebih tinggi dari Multatuli, begitu pula sebaliknya. Karena pada kenyataannya pemikiran dua tokoh Belanda itu akrab dalam pikiran Bung Karno. Bukan sekali-dua Bung Karno mengutip pemikiran Multatuli dan juga Henk Sneevliet. Dalam pidato pembelaannya yang terkenal di hadapan pengadilan negeri di Bandung pada 1930, Bung Karno mengutip Multatuli untuk menjelaskan konteks perbandingan imperialisme dengan sistem tanam paksa yang pernah berlangsung di Indonesia:

“Suatu kumpulan pipa-pipa yang bercabang-cabang tidak terhitung banyaknya dan terbagi-bagi menjadi jutaan pembuluh-pembuluh kecil, semuanya bermuara dalam dada jutaan orang Jawa, semuanya berhubungan dengan induk pipa yang dipompa oleh satu pompa kuat yang digerakkan oleh uap; sedangkan dalam pengusaha partikelir setiap pengejar un-

tung bisa berhubungan dengan semua pipa dan bisa menggunakan mesin pompanya sendiri untuk mengeduk sumber,” urai Bung Karno mengutip Multatuli.

Sedang tentang Sneevliet, dalam pidatonya di depan Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI), Istana Bogor, 3 Desember 1966, Bung Karno mengaku berkenalan untuk kali pertama dengan Marxisme, salah satunya, melalui pendiri ISDV itu:

“Aku, saudara-saudara, karena itu tadi aku dapat bahan dari macam-macam aliran. Bahanku bukan hanya nasionalisme, bukan hanya agama yang aku dapat dari Pak Tjokro (HOS Tjokroaminoto), Pak Dahlan (KH Achmad Dahlan). Bahanku juga dari Marxisme, yang aku dapat dari Semaoen, yang aku dapat dari pemimpin-pemimpin Belanda sebagai Hartogh, Sneevliet... Sneevliet itu *elek-eleko* (“jelek-jelek juga”) dia itu menulis satu buku tebal...buku perjuangan rakyat Indonesia dan bagaimana seharusnya kita menghancurkan imperialisme di Indonesia ini,” kata dia seperti dikutip dari *Revolusi Belum Selesai: Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965 – Pelengkap Nawaksara* yang disunting oleh Bonnie Triyana dan Budi Setiyono.

Dari sana kita bisa memahami bagaimana Bung Karno telah bergaul dengan berbagai pemikiran dan teori-teori sosial-politik sejak belia, terutama Marxisme. Sekaligus pula kita bisa mengerti kalau Bung Karno adalah seorang revolusioner yang inklusif: memetik nilai-nilai progresif dari sebuah ajaran, meramunya menjadi jalan politik yang ditempuhnya hingga akhir hayatnya.

Ini senada dengan apa yang pernah dikemukakan Max Lane¹ dalam tulisannya “Sukarno: Pembelah atau Pemersatu?” yang dimuat *historia.id*, bahwa sejatinya Bung Karno bukan pemersatu, tapi sebaliknya justru memilah unsur-unsur progresif dari yang non-progresif dalam ketiga aliran politik di Indonesia: Nasionalisme, Islam dan Marxisme. Kemudian

1 Artikel ini kemudian di terbitkan di IndoPROGRESS dengan judul yang sama. Lihat: <http://indoprogress.com/2011/07/sukarno-pemersatu-atau-pembelah/>

ketiga unsur yang progresif itu disatukan menjadi kekuatan revolusioner: *samenbundeling van alle revolutionaire krachten*.

Dia memilah kaum Marxis yang progresif yang mau bekerjasama dengan golongan Islam dan Nasionalis. Marxis yang tidak cupet dan mengidap penyakit kiri yang kekanak-kanakan. Begitu pula dia memilah kekuatan Islam yang berpandangan maju, bukan “Islam sontoloyo” sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Bung Karno, bukan pula kalangan Islam yang masih hidup di dalam alam kebudayaan masyarakat “onta” yang membelakangi kemajuan peradaban “masyarakat kapal udara”. Bung Karno juga menghendaki agar kaum nasionalis progresif berada di dalam satu haluan yang sama dengan kedua golongan di atas. Namun bukan nasionalis semacam Hitler yang dikecam Bung Karno sebagai seorang “revolusioner yang retrogresif.”

Bung Karno memegang teguh Marxisme. Karena dengan itu pula dia mampu memahami situasi dan kondisi masyarakat jajahan di alam kolonialisme. Seperti yang dikatakan oleh Rudi Hartono di dalam tulisannya yang berjudul “Bung Karno dan Marxisme”² Marxisme membuatnya tidak rasialis di dalam memandang kolonialisme. Karena memang kolonialisme bukan semata soal dominasi kulit putih atas kulit berwarna atau ekspansi atas nama penyebaran agama.

Kolonialisme adalah sistem yang diciptakan sebagai konsekuensi logis dari kaum modal yang berhasrat untuk mengakumulasi kapitalnya secara terus menerus. Dengan sistem kolonialisme tersebut, jalan menguasai sumber daya alam dan manusia secara murah terbuka lebar. Maka dari sanalah penindasan dimulai. Dan Bung Karno sadar betul keadaan itu.

Dengan kesadaran seperti itu, Bung Karno tidak menjadi seorang nasionalis sempit yang berpeluang jatuh ke dalam pemahaman yang chauvinistis lantas menjadi seorang fasis. Dia menentang nasionalisme ala Hitler yang disebutnya sebagai seorang “revolusioner yang retrogresif”, yang justru membawa Jerman pada kemunduran.

Pidato 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Ke-

² Lihat artikelnnya di halaman 14 buku ini

merdekaan (BPUPK) menunjukkan posisi Bung Karno sebagai seorang nasionalis yang mampu melampaui sekat-sekat rasialisme dan agama untuk mendirikan negara-bangsa Indonesia. “Indonesia adalah negeri oleh semua untuk semua,” kata dia yang pada pidatonya ini mengutip pengertian nasionalisme modern dari Ernest Renan.

Sementara itu sebagai seorang muslim, Bung Karno pun tak termasuk muslim yang cupet dan berpikiran sempit. Dia terbuka terhadap kemajuan dan dia siap mempertahankan pendapatnya itu. Sebagai contoh, pada 1940-an, pada masa dia masih diasingkan, Bung Karno terlibat polemik tentang donor darah yang diharamkan oleh ulama. Buat dia, donor darah itu demi kemanusiaan, tidak ada sangkut pautnya dengan agama seseorang, baik yang mendonorkan maupun penerima donornya.

Dia juga pernah menggunakan kisah anjingnya sebagai tamsil peradaban umat Islam. Suatu hari anjingnya menjilat air di dalam panci. Bung Karno meminta Ratna Djuami, anak angkatnya, agar membuang air dan mencuci panci itu menggunakan sabun, bukan dibilas air tanah sebanyak tujuh kali sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad. “*Islam is progress*, Islam itu kemajuan, dan kemajuan itu menghasilkan ciptaan baru,” kata Bung Karno dalam artikelnya di *Pandji Islam*, edisi Maulud 1940.

Maka benarlah apa kata Bonnie Setawan³ di dalam artikelnya bahwa Bung Karno bukan sekadar nasionalis. Dia adalah seorang revolusioner Sosialis yang tujuan perjuangannya tidak berhenti pada kemerdekaan saja. Melainkan memahami kemerdekaan itu sebagai “jembatan emas” menuju sebuah keadaan di mana masyarakat hidup sejahtera tanpa penindasan dan penghisapan. Itulah sosialisme Indonesia yang diidam-idamkan sepanjang hayatnya.

Namun setelah peristiwa 1 Oktober 1965, cita-cita tersebut perlahan-lahan dihapuskan oleh rezim Soeharto. Sosialisme bukan lagi menjadi tujuan yang utama. Bahkan gerakan kiri ditumpas habis, tak hanya mereka yang komunis namun mereka yang dalam kacamata Bung Karno progresif, sebagaimana yang pernah didedehkannya, turut dihabisi. Maka jangan

3 Lihat artikelnya di halaman lain buku ini: Bonnie Setiawan, *Soekarno itu Kiri Marxix*, hal. 9.

heran jika sebenarnya yang terjadi pada 1965-1966 bukan semata pembasmian kaum komunis, namun juga sebuah aksi genosida politik untuk menghilangkan kekuatan progresif dari panggung politik nasional. Apabila sering dikatakan bahwa konflik yang terjadi pada 1965-1966 adalah pembasmian kaum komunis yang tiada bertuhan dan tak percaya agama, maka cerita itu hanya isapan jempol. Belakangan ini semakin banyak kesaksian-kesaksian diterbitkan yang mematahkan dongeng buatan rezim Soeharto itu.

Sebagai contoh Haji Ahmadi Moestahal, seorang santri lulusan Gontor yang turut aktif di dalam organisasi buruh namun turut pula tertangkap dan dibuang ke pulau Buru. Kisah lain dari Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah, misalnya, ada sekira enam guru agama Katolik yang ditangkap pada 1969 atas tuduhan yang sama. Belum lagi kisah Sukarno-Sentris (SS) yang mengalami nasib yang sama dengan kamerad-kamerad kiri mereka lainnya.

Permulaan pemerintahan Soeharto adalah awal dari “kematian” gagasan serta pemikiran Bung Karno yang lahir sejak zaman penjajahan. Sebuah gagasan maju yang tercipta karena melihat kondisi objektif masyarakat jajahan. Semenjak itu pula, sosok Sukarno hanya dikenang sebagai tokoh kemerdekaan yang pemikirannya jarang dibahas, didiskusikan dan diperdebatkan secara terbuka. Lebih parahnya lagi, ada sebagian orang yang menjadikan Bung Karno justru sebagai fosil dengan mengultuskannya.

Harus diakui pesona Bung Karno memang masih sangat kuat. Dan pesona itu, dengan segala macam kisah heroik serta mitos-mitos yang menyelubunginya, justru dijadikan komodifikasi sosok Sukarno bagi kelompok politik tertentu untuk menarik massa. Dalam zaman demokrasi elektoral seperti saat ini, apapun dilakukan demi meraih suara. Maka demi keperluan politik sesaat itu, gambaran Sukarno justru diburamkan, digambarkan bahwa seakan-akan dia hanyalah seorang nasionalis tanpa pernah disebut bahwa sesungguhnya Sukarno juga adalah seorang Marxis sekaligus muslim progresif yang berpikiran jauh ke depan melampaui zamannya. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya kalau digembar-gemborkan Sukarno seorang Marxis yang mengakui mendapat pelajaran itu dari Henk Sneevliet, tokoh komunis pertama di Indonesia? Entah apa jadinya, entah berapa

perolehan suara yang didapatkan.

Pemburaman sejarah itu memang sudah menjadi gejala kronis semenjak era Soeharto. Apa-apa yang berbau kiri, komunis dan PKI sudah pasti masuk ke jurusan neraka. Pengajaran sejarah tak pernah diberikan secara berimbang dan jujur. Cara pandang orang Indonesia terhadap gerakan kiri, sudah hampir persis seperti cara Donald Trump, calon presiden Amerika Serikat, melihat Islam yang menyamaratakannya dengan terorisme-barbar ala ISIS.

Ini sebetulnya yang tidak diinginkan oleh Bung Karno. Dalam pidatonya di Istora Senayan, 13 Februari 1966, Bung Karno mengungkapkan peran penting PKI dalam sejarah di Indonesia. “Saya tanya, ya tanya dengan terang-terangan, mana ada parpol lain, bahkan parpolku, aku pemimpin PNI, aku ya dipenjarakan, ya diasingkan, tetapi PNI pun tidak sebesar itu sumbangannya kepada kemerdekaan Indonesia daripada apa yang telah dibuktikan oleh PKI. Ini harus saya katakan dengan tegas. Kita harus adil, saudara-saudara, adil, adil, adil, sekali lagi adil,” kata Bung Karno.

Ketidakadilan pengajaran sejarah semasa rezim Soeharto, telah menyebabkan terjadinya pengaburan kenyataan sejarah yang sesungguhnya. Bahkan, suatu hari beberapa tahun lampau, Joesoef Isak editor penerbit *Hasta Mitra*, pernah berkisah kepada saya tentang seorang politikus PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang mengatakan bahwa Bung Karno itu politikus yang nyaris sempurna, memiliki semua bakat dan keahlian. “Sayang sekali dia dekat dengan komunis,” kata politikus yang tak disebutkan namanya itu oleh Joesoef Isak.

Kepada saya Joesoef berkata, “Bagaimana bisa perkataan seperti itu keluar dari mulut seorang politikus partai nasionalis. Dia tak paham sejarah,” kata Joesoef sinis. Toh dia memang benar. Gambaran Bung Karno yang diburamkan selama bertahun-tahun, ditambah pengkultusan sosoknya, membuat Bung Karno berhenti sebagai foto dalam bingkai yang tergantung di tembok rumah. Gagasan-gagasannya sama sekali tak pernah dibicarakan secara luas selama bertahun-tahun. Tak pernah ada kritik terhadap Bung Karno, karena jarang orang yang mempelajarinya atau jangan-jangan takut mengkritik pemikiran Bung Karno karena sosoknya terlalu angker un-

tuk dibicarakan secara kritis.

Buku ini sebetulnya tak perlu pengantar. Apalagi dari saya. Seluruh penulis dalam buku ini adalah segelintir kaum intelektual yang masih berpikir waras dan bersedia untuk mencurahkan pikiran serta perhatiannya kepada gagasan-gagasan Bung Karno. Sehingga dengan jasa mereka, Bung Karno tak akan menjadi fosil sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Ben Anderson dalam tulisannya.

Yang terpenting di dalam keadaan yang serba tak waras ini, bagaimana pemikiran-pemikiran dan tulisan genial tentang Bung Karno ini disebarluaskan agar dibaca oleh anak-anak muda. Supaya mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa Sukarno bukan hanya poster di dalam kamar kos; sticker di kaca belakang angkot; grafiti di tembok kota atau ayah biologis dari anak-anaknya, melainkan seorang pemikir besar yang melahirkan gagasan kemerdekaan dan aktivis politik yang mencurahkan seluruh umurnya untuk pembebasan nasional.***

Penulis adalah Pemimpin Redaksi Majalah *Historia*.



LIFE

I

Sukarno Itu Kiri Marxis

Bonnie Setiawan

SEPEKAN belakangan ini ramai pemberitaan mengenai pelarangan Belok-Kiri.Fest, sebuah festival untuk merayakan gerakan kiri di Indonesia. Sebabnya, tentu saja, karena penggunaan nama “Kiri” dalam acara tersebut telah membuat banyak pihak kepanasan. Warisan rezim bengis Orde Baru bahwa Kiri adalah haram rupanya hendak terus dilestarikan. Padahal, kalau orang sadar, Indonesia sejatinya adalah Kiri. Dua proklamatornya: Sukarno-Hatta, adalah kiri. Sebagian besar bapak (dan ibu) bangsa juga berpaham kiri. Konstitusinya UUD 45 adalah sosialis, khususnya pasal 33. Pancasila dasar Negara juga nilai-nilainya kiri.

Untuk itu, representasi paling kuat dari seorang figur kiri Indonesia yang tidak bisa dihapus atau dihilangkan adalah Sukarno. Indonesia beruntung memiliki Sukarno, seorang pejuang konsisten yang sekaligus proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan Presiden Indonesia pertama. Di dalam diri Sukarno, kita jumpai seorang aktivis yang komplit, yang mampu berpikir komprehensif, bertindak strategis dan merangkul semua orang sehingga terbentuk satu nasion Indonesia yang besar wilayahnya. Tanpa Sukarno, mungkin tidak ada Negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, melainkan terpecah-belah dan sudah sejak awal menjadi beberapa negara sebagaimana kehendak Belanda.

Sukarno atau Bung Karno, demikian ia ingin dipanggil rakyatnya. Bung menjadi panggilan pengganti kamerad, *comrade*, panggilan untuk kesetaraan, panggilan egaliter. Bung Karno ingin disebut di nisannya sebagai “penyambung lidah rakyat Indonesia”, bukan “pemimpin besar revolusi” atau “paduka yang mulia”, sebutan ketika ia masih menjabat sebagai presiden. Penyambung lidah adalah istilah yang mirip diungkapkan oleh Mao Zedong, “rumuskanlah secara sistematis dari rakyat apa-apa yang mereka ucapkan secara bahasa awam”. Penyambung lidah menunjukkan bahwa ia hanyalah instrumen rakyat, penyambung dari kata dan hati rakyat yang

sebenarnya, dan tidak boleh diplintir atau ditunggangi oleh kepentingan pribadi.

Bung Karno seringkali dipahami secara sempit oleh banyak orang, dan ini adalah kesalahan mendasar. Misalnya, Bung Karno dipahami sebagai seorang nasionalis saja, atau sebagai nasionalis kiri. Itu salah. Bung Karno, sebagaimana katanya sendiri, adalah seorang revolusioner. Katanya, kalau menjadi nasionalis maka jadilah nasionalis yang revolusioner; kalau menjadi agamis jadilah agamis yang revolusioner; dan kalau menjadi seorang komunis, dengan sendirinya harus revolusioner. Revolusioner, artinya seseorang yang setia pada ideologi dan pelaksanaan revolusi, yaitu Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia, sebagaimana yang dipahaminya, adalah perjuangan mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur dari sejak revolusi nasional sampai kepada revolusi sosialis. Kemerdekaan, dekolonisasi, barulah jembatan saja, bukan tujuan. Kalau orang nasionalis, maka hanya berhenti di kemerdekaan saja. Bung Karno tidak. Bung Karno ingin terus maju sampai mencapai tujuan Sosialisme Indonesia. Jadi Bung Karno seorang revolusioner Sosialis.

Apa paham atau teori dasar Sosialisme: itulah Marxisme. Bung Karno adalah seorang Marxis plus-plus, yaitu ditambah dengan Nasionalis dan Agamis, yang disebutnya sebagai Nasakom. Bahkan di masa kekuasaannya mulai redup, pada tanggal 28 Februari 1966, Bung Karno terang-terangan mengakui dirinya sebagai Marxis. “Aku tegaskan dengan tanpa tedeng a-ling-aling, ya, aku Marxis,” kata Bung Karno. Menurut pengakuannya, sejak tahun 1928 ia sudah menjadi marxis, sekaligus nasionalis dan agamais. Kita tahu bahwa menjadi nasionalis dan agamis (Islam) adalah askripsi (diturunkan atau diterima begitu saja, *given*). Tetapi menjadi Marxis adalah pilihan individu. Karena itu pula, Bung Karno mencoba mencari padanan istilah yang bisa diterima rakyat kecil dari Marxisme ini, yang ia sebut sebagai Marhaenisme. Marhaenisme, sebagaimana kita tahu, adalah Marxisme yang disesuaikan dengan konteks Indonesia. Jadi, Bung Karno jelas seorang Marxis. Itu yang *pertama*.

Yang *kedua*, sebagai revolusioner Sosialis a’la Indonesia, maka apakah alat-alatnya? Di sini Bung Karno memperkenalkan apa yang disebut sebagai Panca Azimat Revolusi, lima ajimat revolusi Indonesia, yaitu: Na-

sakom, Pancasila, Manipol-Usdek, Trisakti dan Berdikari. Alat pertama, adalah persatuan kaum nasionalis, agamis dan komunis, dalam mencapai tujuan Sosialisme Indonesia. Kedua, Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, sebagai fondasi sebuah nasion yang akan mencapai Sosialisme Indonesia. Ketiga-keempat dan kelima, adalah instrumen-instrumen implementatifnya, dari sejak manifesto politik (manipol) dan lima kunci pelaksanaannya: UUD 45, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Nasional. Trisakti juga sama penekanannya: Berdikari di bidang ekonomi, Berdaulat di bidang politik, dan Berkepribadian nasional di bidang budaya. Dan Berdikari adalah pikiran dasar pembangunan: berdiri di atas kaki sendiri.

Yang *ketiga*, di masa pemerintahannya yang sejati, yaitu sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga kejatuhannya di tahun 1966, maka ia terus menerus konsisten untuk berjuang bersama kaum Komunis. Karena baginya, kaum komunis adalah yang paling konsisten menjalankan revolusi Indonesia. Sukarno dan DN Aidit punya kesamaan pemahaman, yaitu revolusi harus diperjuangkan untuk mewujudkan masyarakat tanpa Kapitalisme dan Imperialisme. Bung Karno dan PKI sama-sama konsisten anti imperialisme. Deklarasi manipol, menetapkan revolusi Indonesia memakai teori revolusi dua tahap, sama seperti teori dua tahap PKI, yaitu tahap revolusi nasional-demokratis dan kemudian baru tahap pengkonstruksian sosialis. Dan hingga akhir hayatnya, Bung Karno tidak pernah mau melarang PKI, meski itu berarti dia kehilangan kekuasaannya.

Karenanya bagi pihak Nekolim, Bung Karno lebih berbahaya ketimbang PKI. Kenapa? Karena sesungguhnya *master-mind* dari pemikiran revolusi Indonesia dan pembangunan Sosialisme Indonesia adalah Bung Karno. Justru PKI yang kemudian mengikuti teori-teori dan pemikiran Bung Karno. Justru PKI dan Aidit yang kemudian berkompromi dengan Bung Karno dan menjadi tidak sesuai lagi dengan jalan komunisme ortodoks, karena menjalankan: parlementarisme dan legalisme, mengadopsi persatuan Indonesia lewat front nasional dan kerjasama nasakom, serta mengadopsi jalan damai menuju Sosialisme. Karena itu peristiwa G30S 1965 pertama-tama tujuannya justru adalah penyingkiran Bung Karno, dengan terlebih dulu memotong dan menghabiskan kekuatan pendukung utamanya, yaitu PKI.

Bung Karno lebih berhasil menerapkan Marxisme ketimbang PKI, yaitu kemampuannya merangkul semua pihak yang sangat berbeda-beda agar semua pihak bisa bersepakat dan bersama-sama berjuang mencapai tujuan yang ditetapkannya, yaitu Sosialisme Indonesia. Jadi kisah atau episode Bung Karno adalah kisah perjuangan menegakkan Sosialisme, bukan terbatas hanya pada kemerdekaan Indonesia atau nasionalisme. Bung Karno bukanlah nasionalis saja. Kita tahu, seorang sosialis pada dasarnya adalah juga seorang nasionalis, tidak bisa dipisahkan. Berkali-kali, hal inilah yang ditekankan Bung Karno, “nasionalisme saya adalah peri-kemanusiaan”. Jadi *beyond nationalism*, lebih tinggi dari sekedar nasionalisme.

Jadi kalau ada yang masih berpikiran bahwa Sukarno atau Bung Karno itu nasionalis, maka itu salah! Partai-partai politik atau siapapun yang menganggap dirinya penerus Bung Karno atau menjalankan perjuangan beliau, harus ingat ini: Bung Karno itu bukan sekedar nasionalis, tapi juga seorang Sosialis dan Marxis. Apakah PDIP atau partai-partai lain yang menyanjung dan memakai pikiran-pikiran politik Bung Karno sudah paham ini, atau sadar mengenai hal ini? Kalau mereka konsisten hendak mewarisi ajaran-ajaran Bung Karno, maka dengan sendirinya mereka juga harus menjadi Marxis dan Sosialis. Atau justru kebalikannya yang terjadi, mereka secara sengaja hanya memanfaatkan nama besar Bung Karno dan meminjam saja slogan-slogannya untuk kepentingan kekuasaan. *Pseudo* Bung Karno atau Sukarno is palsu ini yang banyak berkeliaran. Seperti kata Bung Karno sendiri, memakai nama Bung Karno untuk membunuh Bung Karno.

Bung Karno terlalu besar untuk ditaruh dalam kurungan nasionalis. Sukarno terlalu hebat untuk hanya disederhanakan sebagai seorang nasionalis. Bung Karno, sebagaimana kata-katanya sendiri, “Aku tegaskan dengan tanpa tedeng aling-aling, ya, aku Marxis.” Inilah yang seharusnya menjadi pemaknaan ulang atau pemahaman ulang terhadap Sukarno. Sukarno is adalah sebuah ideologi Marxis yang di-Indonesiakan, atau meng-Indonesiakan Marxisme, dengan tujuan utama adanya Sosialisme a’la Indonesia atau Sosialisme Indonesia untuk terwujudnya masyarakat adil dan makmur.***

Artikel ini sebelumnya telah terbit di laman indoprogress.com, 7 Maret, 2016: <http://indoprogress.com/2016/03/sukarno-itu-kiri-marxis/>



II

Bung Karno dan Marxisme

Rudi Hartono

SALAH satu perbedaan paling mencolok antara Bung Karno dengan para politisi saat ini, adalah penguasaannya yang mendalam akan teori-teori sosial-politik. Ia bukan politisi karbitan, atau menjadi politisi karena keturunan. Ia juga bukan politisi yang asal njeplak, yang tindakan politiknya tidak didasarkan pada panduan teoritis yang jernih dan solid. Sebaliknya, seluruh tindakan politik Bung Karno merupakan refleksi dia atas kondisi-kondisi sosial pada masanya, dan itu semua dituangkannya dalam tulisan maupun pidato-pidatonya. Salah satu sumber pemikiran yang sangat mempengaruhi Bung Karno dalam membaca dan memahami realitas, dengan lebih utuh dan mendalam, adalah marxisme.

Hal ini diakuinya sendiri, seperti yang dituliskannya di koran Pemandangan (1941), bahwa “teori Marxisme adalah satu-satunya teori yang saya anggap kompeten buat memecahkan soal-soal sejarah, soal-soal politik, soal-soal kemasyarakatan.” Jadi, Bung Karno adalah manusia pergerakan bersenjata marxisme. Dan dengan itu pula dia memperjuangkan kemerdekaan bangsanya.

Tetapi di tahun 1966, setelah kontra-revolusi mulai berkuasa, keluar Tap MPRS nomor XXV tentang pelarangan Marxisme. Juga Tap MPR XXVI/MPRS/ 1966 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno yang berusaha membersihkan ajaran-ajaran Bung Karno dari marxisme. Kemudian, pada bulan Desember 1967, Partai Nasionalis Indonesia (PNI) pimpinan Osa Maliki dan Usep Ranuwidjaja yang disokong rezim Orde Baru, membuat Pernyataan Kebulatan Tekad untuk membersihkan marhaenisme dari marxisme. Dan sejak itu marhaenisme di tangan PNI mulai kehilangan apinya.

Efeknya sangat merusak. Tanpa memiliki pengetahuan marxisme, tidak mungkin bisa menyelami ajaran Bung Karno secara mendalam. Tanpa

marxisme, ajaran Bung Karno kehilangan “api”-nya. Tidak mengherankan, ajaran Bung Karno yang terdengar di telinga kita sekarang ini tak lebih dari sebuah frase-frase atau slogan-slogan heroik tanpa isi dan semangat.

Jadi, kalau ada pertanyaan: mengapa ajaran Bung Karno kurang berkembang? Saya kira, jawaban pokoknya adalah karena pemikiran Bung Karno dipelajari tanpa menggunakan analisa atau teori marxisme. Konsekuensinya, kalau ada keinginan menghidupkan kembali api pemikiran Bung Karno, maka marxisme sebagai teori perjuangan sekaligus seperangkat ilmu pengetahuan harus dibebaskan dari belenggu pelarangan dan pemberangusan semenjak era Orde Baru hingga sekarang.

Kontribusi Marxisme

Tidak berlebihan jika saya mengatakan bahwa marxisme berjasa besar bagi Bung Karno. Berkat marxisme, Bung Karno tidak rasis melihat kolonialisme: sebagai ekspresi kulit putih atau kafir. Sebaliknya, dia sadar bahwa kolonialisme adalah konsekuensi dari kapitalisme yang membutuhkan penguasaan terhadap sumber bahan baku, tenaga kerja murah, pasar, dan lahan baru untuk penanaman modal sebagai prasyarat bagi keberlanjutan proses akumulasi kapital.

Karena itu juga, nasionalisme yang dipeluk oleh Bung Karno jauh dari bau-bau chauvinisme (nasionalisme sempit) dan fasisme. Sebaliknya, karena bercampur dengan marxisme, nasionalisme Bung Karno berjiwa progresif. Saya lebih suka menyebutnya “nasionalisme kiri”, karena mengedepankan cita-cita kesejahteraan sosial sebagai tujuan pokoknya.

Marxisme juga sangat mempengaruhi cara dan metode Bung Karno dalam membangun pergerakan politiknya, seperti massa aksi, *machtvorming* (pembangunan kekuatan politik), koran sebagai mulutnya pergerakan, rapat akbar/vergadering, konsep partai pelopor, dan lain-lain. Dan yang terpenting: lahirnya ajaran Marhaenisme.

Marhaenisme Sebagai Marxisme ala Indonesia

Marhaenisme diadopsi Bung Karno dari nama seorang petani yang

ditemuinya saat melakukan riset di daerah Bandung Selatan tahun 1920-an. Bung Karno menyebut marhaenisme sebagai “marxisme yang diselenggarakan, dicocokkan, dilaksanakan di Indonesia, *is het in Indonesie toegepaste marxisme* (Kursus Pancasila, 1958). Jadi, marhaenisme adalah marxisme ala Indonesia.

Tentu, sebagian kita bertanya, apa yang coba dicocokkan antara marxisme dan keadaan Indonesia? Sebagai seorang marxis, Bung Karno jelas memakai analisa kelas. Dalam marxisme, menurut bacaan dia, selalu ada kelas sosial yang memainkan tugas sejarah untuk mengubah relasi produksi agar sejalan dengan tuntutan kemajuan tenaga-tenaga produktif. Di Eropa, tugas sejarah itu berada di pundak kelas proletar.

Tetapi masyarakat Indonesia berbeda. Kendati sudah ada kaum proletarnya, seperti di perusahaan kereta api, perusahaan pegadaian, pertambangan, dan lain-lain, tetapi jumlahnya masih sangat kecil. Sementara yang dominan adalah pemilik produksi kecil-kecilan: pertanian kecil, perdagangan kecil, dan usaha produksi kecil. Kehidupan mereka sangat sengsara dan melarat.

Kendati sama-sama melarat, namun proletar berbeda dengan marhaen. Proletar adalah terminologi yang digunakan oleh Marx untuk menjelaskan sebuah kelas yang dilahirkan oleh perkembangan kapitalisme di Eropa. Marx menyebutnya ‘kelas pekerja modern’. Proletar ini dicirikan oleh: (1) mereka tidak punya alat produksi; (2) untuk bertahan hidup, mereka menjual tenaga kerjanya kepada majikan/kapitalis; dan 3) dari menjual tenaga kerjanya itulah ia mendapatkan upah. Sedangkan Marhaen, kendati kehidupannya melarat seperti proletar, masih punya alat produksi. Bung Karno mengatakan bahwa Marhaen sebagai prototipe dari kaum pemilik produksi kecil ini dicirikan oleh 1) pemilik produksi kecil; mereka tidak menyewa atau mempekerjakan orang lain (biasanya dikerjakan sendiri bersama anggota keluarga); (2) mereka tidak punya majikan ataupun buruh upahan; dan (3) hasil produksinya hanya untuk kebutuhan sendiri dan keluarganya.

Dengan analisa kelas ini, Bung Karno menemukan tenaga utama untuk mendorong revolusi Indonesia, yaitu kaum marhaen. Dalam perkembang-

annya, istilah marhaen ini diperluas cakupannya hingga meliputi seluruh sektor rakyat jelata: unsur kaum miskin proletar Indonesia (buruh), unsur kaum tani melarat Indonesia, dan unsur kaum melarat Indonesia lainnya. Namun demikian, ia tidak menampik peran kepeloporan yang dimainkan oleh proletar. Ia juga percaya bahwa takdir historis penggulingan kapitalisme berada di tangan proletar. Karena itu, katanya, “Nah, tentara kita adalah benar tentaranya Marhaen, tentaranya kelas Marhaen, tentara yang banyak mengambil tenaganya kaum tani, tetapi barisan pelopor kita adalah barisannya kaum buruh, barisannya kaum proletar.”

Satu pertanyaan yang mungkin mendayung di tengah kegelisahan kita adalah: apakah marhaenisme masih relevan dalam konteks Indonesia saat ini? Saya akan menjawab: iya. Merujuk kepada data resmi 2015, hampir 70 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor informal. Kategori sektor informal adalah pedagang kaki lima, perdagangan kecil, perajin kecil, dan pertanian dalam skala kecil. Ini meliputi keseluruhan sektor perdagangan mikro (asongan, PKL, calo, dll), Industri pengolahan mikro (industri rumah tangga, kerajinan, dan lain-lain), dan pertanian mikro (petani menengah, miskin, dan gurem).

Artinya, mayoritas rakyat Indonesia sekarang ini sebetulnya adalah pemilik produksi kecil. Mereka adalah kaum marhaen. Dan ingat, mereka termasuk sektor sosial yang paling dikorbankan oleh neoliberalisme, selain kaum buruh dan sektor kaum miskin lainnya.

Cita-cita Marhaenisme: Sosialisme Indonesia

Marhaenisme, seperti dijelaskan Bung Karno di Konferensi Partindo, 1933, adalah azas yang menghendaki susunan masyarakat dan susunan negeri yang di dalam segala halnya menyelamatkan Marhaen. Karena itu, marhaenisme hendak menghilangkan kapitalisme dan imperialisme. Sebab, kedua sistim itu telah menghisap dan menindas rakyat jelata.

Dalam pidato Tahun Vivere Pericoloso-TAVIP, 17 Agustus 1964, Bung Karno tegas menyatakan bahwa Revolusi Indonesia yang bergelora sejak Agustus 1945 bermuara pada Sosialisme Indonesia.

Sebetulnya, jauh hari sebelumnya Bung Karno sudah mengidamkan masyarakat sosialis sebagai cita-cita politik pergerakannya. Seperti ditulisnya di risalah Mencapai Indonesia Merdeka, 1933: “maksud pergerakan kita haruslah: suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang tidak ada tindasan dan hisapan, yang tidak ada kapitalisme dan imperialisme.”

Seperti apa sosialisme yang dibayangkan oleh Bung Karno? Di buku Sarinah, yang merupakan kumpulan kuliah Bung Karno dalam kursus Wanita di Jogjakarta tahun 1946, dijelaskan soal sosialisme ala Bung Karno. Menurutnya, esensi dari sosialisme adalah kesejahteraan sosial atau kemakmuran bagi semua orang. Dan sebagai syaratnya: harus ada kepemilikan pabrik yang kolektif; ada industrialisme yang kolektif; ada produksi yang kolektif; dan ada distribusi yang kolektif.

Bung Karno meyakini, supaya kesejahteraan kolektif bisa tercapai, harus ada kemajuan teknik dan kemajuan pengetahuan. Ini sejalan dengan proposisi marxisme, bahwa perkembangan kekuatan-kekuatan produktif, yang di dalamnya mencakup kemajuan teknik dan kecakapan manusia, yang tidak dirintangi hubungan-hubungan produksi—kalau dirintangi, akan dijebol melalui “Revolusi”—melahirkan perubahan corak produksi.

Bung Karno sendiri mengatakan, “alat-alat teknik, dan terutama sekali semangat gotong-royong yang telah masak, itulah soko-gurunya pergaulan hidup yang sosialis.” Artinya, kemajuan kekuatan-kekuatan produktif, terutama kemajuan teknik dan kecakapan manusia, harus disertai dengan relasi produksi yang bersifat gotong-royong.

Selain itu, Bung Karno menegaskan, “sosialisme Indonesia sebagai hari depan Revolusi Indonesia bukanlah semata-mata ide ciptaan seseorang “in een slapeloze nacht” (dalam satu malam yang tidak tidur), juga bukan suatu barang yang diimpor dari luar negeri, atau sesuatu yang dipaksakan dari luar masyarakat Indonesia, melainkan suatu “reaktief verzet van verdrukte elementen” (perlawanan penentangan daripada anasir/kaum yang tertekan), suatu kesadaran sosial yang ditimbulkan oleh keadaan sosial Indonesia sendiri, suatu “historische Notwendigkeit”, suatu keharusan sejarah.” Karena itu, sosialisme Indonesia akan diperkaya dengan tradisi progresif yang sudah mengakar dalam masyarakat Indonesia, yaitu

gotong-royong.

Keyakinan Bung Karno di atas mirip dengan kesimpulan seorang marxis berpengaruh di Amerika Latin, Jose Carlos Mariategui, yang mengatakan bahwa sosialisme di Amerika Latin tidak boleh menjadi suatu “tiruan murni” atau “salinan” saja dari pengalaman-pengalaman sosialisme yang sudah ada, melainkan merupakan hasil “penciptaan yang heroik”, yang sesuai dengan karakteristik dan kekhususan masing-masing bangsa.

Bagaimana Mewujudkan Sosialisme Indonesia

Bung Karno banyak belajar dari pengalaman revolusi Perancis. Di sana, kaum borjuis berusaha menarik kaum proletar dan kaum tani dalam persekutuan di bawah slogan kebebasan (*liberté*), persamaan (*egalité*) dan persaudaraan (*fraternité*) untuk menumbangkan kekuasaan feodal. Namun, begitu kekuasaan feodal ditumbangkan, kaum borjuis membangun kekuasaannya sendiri dengan menyingkirkan kaum proletar dan kaum miskin lainnya.

Bung Karno tidak mau kesalahan revolusi Perancis berulang dalam revolusi Indonesia. Karena itu, sejak awal ia mewanti-wanti, dalam perjuangan mendatangkan Indonesia merdeka, kaum Marhaen harus menjaga agar jangan sampai nanti mereka yang kena getahnya, tetapi kaum borjuis atau ningrat yang memakan nangkanya. Untuk itu, dia menghadirkan dua gagasan besar, yaitu sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi.

Sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang berpihak, yakni kepada massa-rakyat. Sosio-nasionalisme menolak borjuisme (*kapitalisme*) dan keningratan (*feodalisme*). Sosio-nasionalisme mencita-citakan sebuah masyarakat yang di dalamnya tidak ada lagi penindasan dan eksploitasi oleh suatu kelas terhadap kelas tertentu. Atau pendek kata: sosio-nasionalisme adalah nasionalisme yang menghendaki “masyarakat tanpa kelas” alias “masyarakat adil dan makmur”.

Untuk mencapai itu, sosio-nasionalisme menawarkan beberapa hal. Pertama, sosio-nasionalisme mempromosikan nasionalisme politik (politik nasional yang berdaulat) dan nasionalisme ekonomi (ekonomi nasional

yang berdikari). Nasionalisme politik menjamin penyelenggaraan kekuasaan politik negara Republik Indonesia tidak direcoki, apalagi didikte, oleh bangsa atau kekuatan asing. Sementara nasionalisme ekonomi memastikan kedaulatan negara terhadap seluruh kekayaan ekonomi nasional.

Kedua, sosio-nasionalisme menempatkan kemerdekaan nasional hanya sebagai “jembatan emas” untuk mencapai cita-cita perjuangan yang lebih tinggi, yakni masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian, tujuan akhir perjuangan nasional bangsa Indonesia bukanlah pada terbentuknya negara merdeka saja, melainkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Ketiga, sosio-nasionalisme mengawinkan antara semangat kebangsaan dan kemanusiaan. Dengan begitu, sosio-nasionalisme mencegah nasionalisme Indonesia terjebak dalam nasionalisme sempit atau chauvinis. Selain itu, sosio-nasionalisme menganggap perjuangan untuk emansipasi nasional tidak terpisahkan dengan perjuangan bangsa-bangsa di seluruh dunia untuk mewujudkan dunia yang adil dan beradab.

Dengan tiga hal tadi, saya kira, kontribusi sosio-nasionalisme adalah menyediakan koridor yang aman bagi perjuangan nasional Indonesia menuju cita-cita akhirnya, yaitu masyarakat adil dan makmur. Dengan koridor itu, perjuangan nasional Indonesia tidak berhenti pada pintu gerbang kemerdekaan, tetapi berlanjut hingga masyarakat tanpa penindasan dan penghisapan terbentuk.

Kemudian tawaran sosio-demokrasi. Sosio-demokrasi adalah antitesa dari demokrasi parlementer yang dihasilkan oleh Revolusi Perancis. Sosio-demokrasi juga menegaskan keberpihakan, yakni kepada rakyat-marhaen. Secara harfiah sosio-demokrasi berarti demokrasi masyarakat atau demokrasi massa-rakyat. Karena keberpihakan itu, sosio-demokrasi juga menolak borjuisme (kapitalisme) dan keningratan (feodalisme).

Lantas muncul pertanyaan, apa keterhubungan antara sosio-demokrasi dengan cita-cita marhaenisme, yakni mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur?

Pertama, sosio-demokrasi mengidamkan sebuah kekuasaan politik di ta-

ngan rakyat-Marhaen. Bentuk konkritnya adalah Staat (Negara) Rakyat, dimana seluruh urusan ekonomi dan politik dikerjakan oleh rakyat, dengan rakyat, dan untuk rakyat. Seperti ditegaskan oleh Sukarno dalam risalahnya yang terkenal, Mencapai Indonesia Merdeka, tahun 1933:

“Urusan politik, urusan diplomasi, urusan onderwijs, urusan bekerja, urusan seni, urusan kultur, urusan apa sahaja dan terutama sekali urusan ekonomi haruslah di bawah kecakrawartian Rakyat itu: Semua perusahaan-perusahaan-besar menjadi miliknya staat, – staatnya Rakyat, dan bukan staatnya burjuis atau ningrat semua hatsil-hatsil perusahaan-perusahaan itu bagi keperluan Rakyat, semua pembahagian hatsil itu di bawah pengawasan Rakyat.”

Kedua, sosio-demokrasi mendorong kepemilikan sosial terhadap alat-alat produksi dan sumber daya ekonomi. Inilah pijakan bagi penerapan demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi di lapangan ekonomi, maka demokrasi di lapangan politik dan budaya menjadi sangat mungkin. Sebab, ekonomi merupakan pangkal bagi kehidupan politik dan sosial-budaya. Siapa yang menguasai sumber-sumber ekonomi, maka dia pula yang berjaya di lapangan politik dan sosial-budaya.

Ketiga, dengan menyerahkan urusan ekonomi dan politik di tangan rakyat, sosio-demokrasi menghilangkan pemisahan antara ekonomi dan politik sebagaimana lazim terjadi di bawah kapitalisme. Urusan pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak lagi dianggap urusan individu semata, tetapi menjadi urusan kolektif/publik.

Tetapi Bung Karno tidak berhenti di gagasan. Dia juga menawarkan strategi politik. Kata dia, untuk mewujudkan sosialisme Indonesia, revolusi Indonesia mesti berjalan melalui dua fase: fase nasional-demokratis dan fase sosialisme. Dalam fase nasional demokratis, kita akan mendirikan Negara Indonesia yang merdeka dan demokratis. Sedangkan dalam fase sosialisme, kita akan mendirikan sosialisme. Dalam fase nasional demokratis, sasaran pokok revolusi adalah mengakhiri penindasan nasional (kolonialisme/imperialisme) dan menghancurkan sisa-sisa feodalisme. Dalam fase ini, perjuangan kita adalah meremukkan kolonialisme di lapangan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Selain itu, akan dijalankan land-reform se-

bagai upaya menghapuskan hak-milik tuan feodal dan mendemokratiskan kehidupan rakyat di pedesaan.

Dalam fase nasional-demokratis ini, ungkap Bung Karno, kita juga menyiapkan syarat-syarat untuk dimulainya fase selanjutnya, yakni revolusi sosialis. Syarat-syarat itu, antara lain, memajukan teknik/industrialisasi, mencerdaskan kehidupan rakyat, mendorong demokratisasi seluas-luasnya, dan membangun mental dan kepribadian sebagai sebuah bangsa.

Gagasan Trisakti, yang mencita-citakan sebuah negara nasional yang berdaulat di bidang politik, berdikari di lapangan ekonomi, dan berkepribadian secara budaya, sebetulnya berada di tahapan di revolusi nasional-demokratis. Trisakti adalah jalan untuk mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia.

Dalam buku Sarinah, Bung Karno menyatakan bahwa konstitusi kita, yakni UUD 1945, mencerminkan transisi dari negara nasional borjuis menjadi negara sosialis. “Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar sebuah negara yang sifatnya di tengah-tengah kapitalisme dan sosialisme,” kata Bung Karno. UUD 1945 itu, kata dia, di satu sisi kakinya masih berpijak dalam bumi burgerlijk (kapitalistik), tetapi di dalam kandungannya telah hamil dengan kandungan masyarakat sosialis. Inilah konsep negara peralihan ala Bung Karno, yakni sebuah negara yang sedang melakukan transisi ke sosialisme.

Kemudian, tahap yang kedua, yakni revolusi sosialis, yang mengarah pada perwujudan sosialisme Indonesia, yang tidak ada lagi kapitalisme dan l’exploitation de l’homme par l’homme. Salah satu ciri utama dari sosialisme adalah kepemilikan sosial terhadap alat produksi. Dan di sini, seperti ditekankan oleh Bung Karno, negara hanya berfungsi sebagai organisasi atau alat, tetapi pemilikan sosial yang sesungguhnya harus di tangan rakyat.***

Artikel ini sebelumnya telah terbit di laman indoprogress.com, 9 Maret, 2016: <http://indoprogress.com/2016/03/bung-karno-dan-marxisme/>

III

Menggugat Sukarno dan Sejarah Yang Belok Kanan

Airlangga Pribadi Kusman

AKHIR-akhir ini, ada suasana baru mengembirakan yang tengah tumbuh di tengah gerakan kaum muda kiri Indonesia. Suasana baru ini adalah mulai tumbuhnya minat dan hasrat yang menyala untuk membahas dan mengedepankan gagasan sosialisme a la Indonesia yang dipelopori oleh pendiri Indonesia, Sukarno. Sebagian dari tumbuhnya antusiasme terhadap Sukarno tampil dari pembicaraan tentang hal-hal permukaan seperti wibawa, ketegasan, maupun jargon-jargon revolusionernya. Sebagian yang lain mulai mengarah pada hal yang substansial berkaitan dengan saripati gagasannya, yakni pembacaan tentang situasi Indonesia berdasar pada sudut pandang materialisme historis, materialisme dialektika, dan rumusan sosialisme dalam konteks keindonesiaan.

Semua dari gagasan yang hadir di ruang publik ini memperlihatkan dukungan dan kecintaan atas ajaran-ajaran Sukarno dengan memperlihatkan keutamaannya. Berbeda dengan karya-karya aktual tentang Sukarno yang memperlihatkan kecintaan terhadap Sukarno dengan menunjukkan keutamaan dari gagasan beliau, tulisan ini adalah manifestasi dari kecintaan dialektik atas Sukarno dan ajaran-ajarannya. Kecintaan yang termanifes melalui gugatan atas kontradiksi pemikiran, posisi politik, dan langkah-langkah Sukarno dalam mengusung Sosialisme Indonesia yang ia yakini.

Melalui gugatan atas Sukarno, maka kita dapat belajar dari kesalahannya dan mengusung kembali api dari gagasannya, yakni sosialisme, tanpa terjerembab dalam kesalahan yang sama. Mengingat sosialisme sebagai sebuah proyeksi politik dilahirkan kembali dan disodorkan dalam arena politik, melalui proses menyejarah yang tak henti dari kritisisme-diri dan

gugatan atas praksis yang telah terbangun, bukan semata-mata penonjolan atas keistimewaan dari yang telah menjadi bagian dari sejarah. Seperti yang pernah diuraikan oleh filsuf Slovenia Slavoj Žižek, bahwa eksperimentasi sosialisme yang berlangsung di negara-negara Amerika Latin tidak membutuhkan dukungan dan pembelaan apologetik. Yang dibutuhkan menuju keberhasilan eksperimentasi sosialisme tersebut adalah gugatan keras dan kritik yang tajam untuk mendorong pada kemajuan eksperimentasi politik.

Tulisan ini setidaknya melihat ada hal yang patut dielaborasi terkait dengan bagaimana kita memahami sekaligus mengkritisi pikiran dan aksi politik Sukarno dalam biografi politiknya. Salah satu kekuatan sekaligus kelemahan dari gagasan Sukarno adalah terkait dengan karakter kiri sinkretik yang terus ia jalankan untuk membangun jalan sosialisme Indonesia. Kekirian sinkretik dari gagasan Sukarno adalah bagian dari pemikiran khasnya dibandingkan dengan para pemikir pergerakan kiri nasional di Indonesia.

Sinkretisme Sukarno bukanlah sebuah sinkretisme tanpa basis fondasi ekonomi-politik yang jelas. Di dasar pemikiran sinkretisme Sukarno, terbangun pemahaman sejarah berdasarkan gagasan materialisme historis, bahwa corak bangunan masyarakat adalah refleksi dari pertarungan sosial di antara kelas-kelas sosial untuk menguasai alat-alat produksi, yang mana di dalamnya terjadi konsentrasi kekuasaan dan akumulasi kemakmuran oleh kelas dominan dengan mengeksploitasi kelas-kelas sosial yang ada di bawah kendalinya. Singkatnya, dominasi kelas borjuis atas kelas proletar, buruh dan petani. Dalam corak masyarakat kapitalistik seperti ini, maka upaya untuk mengatasinya adalah dengan mengintroduksi gagasan politik revolusioner untuk mewujudkan tatanan sosialisme.

Membaca konteks sejarah era tahun 1920-an, di tengah konflik dan pertikaian antara kaum sosialis, Islam dan nasionalis dan surutnya dua organ politik utama pergerakan nasional yakni Sarekat Islam dan PKI, gagasan politik Sukarno tampil melalui ide pembelahan dan persatuan. Dihadapkan pada krisis absennya organ politik pergerakan sekitar tahun 1920-an, Sukarno mengusung pembelahan antara kaum reaksioner pro penjajahan dan kaum progresif revolusioner (di berbagai kubu baik komunis, nasio-

nalis maupun Islam) yang tidak saja menggugat kolonialisme, namun juga kaum-kaum yang menggugat tatanan ekonomi-politik yang melandasi rezim kolonialisme, yakni kapitalisme dalam wujud imperialisme.

Dalam formulasi awal gagasan Sukarno yang tertera dalam tulisannya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, secara brilian sinkretisme kiri berhasil meyakinkan kaum pergerakan dari berbagai corak ideologis untuk bersatu dan membangun organ politik revolusioner untuk mencapai Indonesia Merdeka berdasarkan pada perjuangan sosialisme. Eksperimentasi politik persatuan yang dituntun oleh corak gagasan marxisme dan sinkretik dari Sukarno, terbukti berhasil membangun strategi blok sejarah yang mempertemukan berbagai gugus ideologis dan kepentingan-kepentingan partikular dan sektoral dalam perumusan politik kolektif yang solid dan radikal. Dimana aspirasi persatuan nasional diletakkan dalam pembelahan kaum revolusioner dan kaum reaksioner, dan tujuan revolusioner untuk menuntaskan revolusi nasional dalam koalisi front nasional yang inklusif sekaligus radikal.

Problem dari praksis politik kiri-sinkretik Sukarno justru terjadi pada saat-saat yang menentukan, ketika langkah untuk mewujudkan Indonesia menuju sosialisme tengah berlangsung pada era tahun 1960-an. Dalam saat-saat yang menentukan seperti itu, Sukarno terlihat berada dalam kegalauan untuk merekonsiliasikan antara karakter sinkretik yang termanifestasi dalam jargon persatuan Indonesia, dan gagasan marxisme yang melihat bahwa dalam saat-saat menentukan dalam perjalanan sejarah, maka konflik sosial dan dialektika perbenturan antara aliansi-aliansi kelas sosial yang berbeda kepentingan melalui politik revolusi adalah sebuah jalan yang harus dilalui untuk mencapai emansipasi.

Apabila perjalanan sejarah mengenal kata 'andaikata', tentunya kudeta merangkak Suharto, penghancuran gerakan kiri maupun pembantaian 500 ribu sampai 3 juta nyawa manusia tidak perlu terjadi, ketika sejak awal Sukarno menginsafi bahwa dalam praksis politik pada akhirnya idenya tentang sosialisme a la Indonesia harus mengintervensi kenyataan dan siap akan konsekuensi radikal dan paling jauh dari impelementasinya.

Ketika pada saat-saat menentukan seputar 1965, Sukarno berani untuk

mengambil jalan kaum Jacobin di Revolusi Prancis, Lenin di Revolusi Rusia yang membersihkan revolusi dari pengaruh kaum Menshevik, maupun Abraham Lincoln dalam revolusi menentang perbudakan maka trajektori politik Indonesia kemungkinan akan tidak tersabotase oleh jalan politik kontra revolusi. Sebab sebuah cita-cita politik emansipatoris revolusioner haruslah siap dengan bayaran yang paling besar, seperti halnya sebuah cita-cita demokrasi untuk mengusung kesetaraan manusia. Seperti halnya ketika Abraham Lincoln menyatakan perang terhadap perbudakan, pelajaran yang dapat kita ambil adalah sebuah cita-cita demokrasi, kebebasan dan kesetaraan sosial membutuhkan determinisme politik dan sentralisme kekuasaan melalui kompromi politik.

Demikianlah kalau kita kembali ke belakang, apabila Sukarno sadar bahwa cita-citanya tentang Indonesia yang bersatu dan sosialisme tidak dapat direalisasikan semata-mata dengan kompromi politik, namun ada saat-saat yang menentukan dimana kenyataan sosial yang keras membutuhkan realisasi teoritik sampai ke arah yang paling radikal. Bahwa resiko dari mengedepankan ide Sosialisme Indonesia, maka harga yang harus dibayar adalah keberanian untuk menghadapi lawan-lawan ideologis gagasan tersebut sebelum berkembang menghancurkan bangunan revolusi itu sendiri. Kalau saja itu terjadi mungkin riwayat sejarah Indonesia akan belok kiri, tidak belok kanan.***

Artikel ini sebelumnya telah terbit di laman indoprogress.com, 11 Maret, 2016: <http://indoprogress.com/2016/03/menggugat-sukarno-dan-sejarah-yang-belok-kanan/>

IV

Sukarno yang (Di)Kalah(kan) Total

Max Lane

TIDAK BISA disangkal lagi Sukarno, bersama seluruh generasinya, berhasil menang dalam perjuangan merebut kemerdekaan dan mendirikan Republik Indonesia. Dan kemenangan itu bukan kemenangan kecil. Negeri Belanda pada tahun 1945-1949 masih bisa menggerakkan banyak modal, manusia dan senjata. Sementara itu pihak Republik masih serba kekurangan. Satu-satunya modal perjuangan adalah kesadaran politik massa yang sudah dibangun selama 35 tahun sebelumnya. Dalam semua proses itu, Sukarno mengambil peran sangat menentukan. Dia memimpin sebuah gerakan yang menang.

Sesudah merdeka lain lagi ceritanya. Sukarno maju sebagai pemimpin gerakan yang mau membangun sosialisme Indonesia. Pada 1965, massa yang digerakkan oleh Sukarno, Partai Nasional Indonesia, Partindo, Partai Komunis Indonesia dan ormas-ormasnya sudah mencapai hampir 25 juta orang. Semua massa itu adalah pendukung Sukarno dan gerakan sosialisme ala Indonesia yang dipimpinya. Dia bukannya tak punya lawan. Saat itu yang menentang Sukarno: sebagian besar militer, Partai Sosialis Indonesia dan ormasnya, Masyumi dan ormasnya dan sebagian dari pemimpin dan ormasnya Nahdatul Ulama. Indonesia terbelah.

Tapi sekarang, tahun 2011, jarak situasi Indonesia dengan Indonesia yang diperjuangkan oleh Sukarno sangatlah jauh. Dia memperjuangkan sosialisme Indonesia: di mana rakyat yang mayoritas berkuasa dan bekerja dengan semangat gotong-royong; di mana Indonesia merupakan bagian daripada gerakan persatuan New Emerging Forces (NEFOS) yang sedang dalam proses membangun sebuah tatanan dunia baru, tanpa kolonialisme tanpa neo-kolonialisme. Tetapi Indonesia yang berkembang dari 1965 sampai 2011, adalah Indonesia yang sepenuhnya tergerakkan oleh dina-

mika kapitalisme – kapitalisme vulgar eksploitatif dan terbelakang pula, dengan elit berkuasa yang memiliki ciri khas sama – dan menyatunya dengan kekuatan imperialis yang berpusat di Washington, London, Tokyo, dan Canberra.

Dengan kata lain: Sukarno gagal total dalam memperjuangkan cita-citanya. Dalam situasi bangsa yang terbelah pada tahun 1965, kendati massa pendukung Sukarno lebih banyak, justru kubu lawannyalah yang menang total.

Mengapa bisa begitu?

Mungkin ada berbagai faktor yang bisa ditinjau, mulai dari kekuatan bersenjata yang ada di tangan lawannya sampai dengan taktik konspirasi keblinger yang dilakukan oleh seorang “pendukung”nya, dan banyak lainnya. Tetapi orang yang menilai positif Sukarno secara umum, juga harus berani bertanya apakah ada cacat dalam pemikiran atau praxis Sukarno sendiri yang memungkinkan kekalahannya. Menurut pendapat saya: ya, ada.

Kontradiksi Dalam Praxis Demokrasi

Esensi daripada demokrasi yang sejati adalah keterlibatan seluruh rakyat (atau semakin lama semakin banyak rakyat) dalam kehidupan politik negeri. Rakyat banyak (rakyat miskin dalam kasus Indonesia) semakin menjadi penentu dalam proses pengambilan keputusan. Format dan bentuk proses ini bisa macam-macam. Di Indonesia tahun 1960-an, banyak rakyat Indonesia masuk organisasi dan melalui keterlibatannya di organisasi mereka semakin terpolitisir, semakin membaca dan mendiskusikan politik, dan semakin memobilisasi diri untuk menuntut keinginannya. Proses ini juga memang dipimpin Sukarno (secara ideologis) dan diorganisir partai-partai seperti PKI, PNI, dan Partindo. Dari segi itu, gerakan tersebut merupakan gerakan yang meningkatkan kehidupan demokrasi kerakyatan. Hanya saja periode paling intensifnya yang berlangsung 1962-1965, terlalu singkat untuk bisa dievaluasi secara final.

Tetapi di saat yang sama, gerakan demokrasi kerakyatan radikal ini berkem-

bang dalam suatu kerangka politik yang kontradiktif. Di satu sisi demokratis (dalam arti rakyat mulai lebih aktif terlibat dalam politik), di lain sisi tidak demokratis. Ada berapa contoh ketidak-demokratisannya. Pertama, pemerintah melarang Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan Masyumi. Benar ada tokoh-tokoh dua partai ini yang terlibat PRRI-Permesta, sebuah pemberontakan bersenjata yang ilegal. Tetapi melarang kegiatan seluruh partai karena keterlibatan beberapa tokoh merupakan upaya administratif (bukan tindakan politik) untuk mengatasi masalahnya. Tidak jauh berbeda dengan Suharto melarang kegiatan PKI, karena keblingeran segelintir kecil pemimpinya yang terlibat Gestapu. Begitu juga di kemudian hari pemerintah Sukarno melarang Partai Murba, atas desakan PKI. Pula larangan yang tak perlu terhadap Manikebu, manifesto kanan anti-politik oleh segelintir seniman dan intelektual. Semua partai yang dilarang, dilarang saja, tidak ada proses pembasmian. Ini juga berarti bahwa perpolitikan mereka tetap eksis tetapi hanya masuk ke pasar gelap politik.

Kedua, ada proses mentotalitariankan bahasa politik. Dengan dilarangnya PSI dan Masyumi, bahasa politik konservatif dan kanan kehilangan ruang gerak padahal masih cukup banyak rakyat Indonesia, biarpun mungkin semakin minoritas, yang menganutnya. Semua diskusi politik harus memakai bahasa yang diciptakan Sukarno. Di satu segi ini adalah hasil daripada semakin besar dukungan buat kubu kiri. Dengan sendirinya kubu konservatif akan semakin kecil dan marjinal. Ini juga mengakibatkan ketimpangan dan distorsi terhadap kehidupan politik demokratik.

Di dalam pikiran politik Sukarno, memang ada unsur yang membuka kemungkinan distorsi seperti itu. Sukarno sangat kritis terhadap 'demokrasi liberal' maupun 'parlementer demokrasi.' Ini bisa di lihat dari berbagai tulisannya. Ini ada dua contoh dari kuliah Sukarno tentang Pancasila yang diadakan di Istana Negara pada 1958:

'Parlementair demokrasi adalah hanya ideologi politik, Parlementair demokrasi memberi kans yang sama secara demokratis kepada semua orang di bidang politik, itupun zoegenamnd [seharusnya]. Sebab dalam praktiknya si pemegang uanglah yang bisa membiayai surat-kabar, membiayai propaganda.

Parlementair demokrasi adalah ideologi politik dari kapitalisme yang sedang naik. kita dus sebenarnya tidak boleh memakai parlemantaire demokrasi.']

Juga sangat terkenal kritikan Sukarno yang menyerang demokrasi liberal sebagai hanya 'demokrasi 50% plus 1' dan kemudian tekanannya pada menggunakan musyawarah.

Kritik Sukarno terhadap demokrasi liberal mempunyai dua asal yang pokok. Pertama, caranya mengkritik demokrasi liberal berasal dari kritikan umum yang sering diungkapkan oleh kaum kiri di mana pun. Dalam demokrasi liberal semua warganegara dan semua kekuatan punya hak formal yang sama, tetapi karena kekuatan keuangannya berbeda maka hak formal yang sama ini sebenarnya batal, sebab kata Sukarno: 'Dalam praktiknya si pemegang uanglah yang bisa membiayai surat-kabar, membiayai propaganda.' Kritik itu sangat benar.

Asal-usul kedua dari kritikan Sukarno adalah pengalaman Indonesia sendiri sejak kemerdekaan, yaitu periode 1950-1958. Selama periode tersebut, kehidupan politik demokrasi parlementer diwarnai oleh gonta-ganti koalisi kabinet. Friksi antar partai semakin tajam. Sukarno dan banyak orang lain mengeluh terjadinya saling 'jegal-menjegal.' Sebenarnya masalah yang sama sering juga dikeluhkan oleh masyarakat pada zaman sekarang yang tercerminkan melalui komentar bahwa ada terlalu banyak partai. Saat ini masalah tersebut dicoba diselesaikan sepenuhnya dengan cara administratif, yakni dengan cara mempersulit proses verifikasi untuk ikut Pemilu kemudian dengan usulan menaikkan threshold.

Tetapi problem yang sama, baik tahun 1950-an maupun zaman sekarang bukan masalah demokrasi liberal itu sendiri. Problem itu adalah cerminan daripada fenomena lain yang juga sering dikomentari Sukarno, apalagi sebelum kemerdekaan. Menurut Sukarno semua hal di Indonesia, termasuk kehidupan demokrasi tentunya, tak bisa berkembang lebih besar dan esensial akibat tak terjadinya industrialisasi. Ini juga berlaku sampai sekarang, bahkan untuk Indonesia pada tahun 2011. Meskipun terjadi pembesaran sektor manufaktur, jenis manufakturnya tidak berkembang lewat industrialisasi tetapi lewat perluasan banyak manufaktur yang ber-

skala kecil. Akibat dari realitas itu adalah banyaknya pengelompokan kelas borjuis dalam negeri Indonesia yang berskala kecil. Situasi kepartaian mencerminkan kenyataan itu.

Di zaman sekarang, untuk menghadapi carut-marut seperti itu solusinya bisa mengambil langkah administratif. Bikin saja peraturan yang akan mengakibatkan jumlah partai berkurang. Di tahun-tahun Demokrasi Terpimpin, Sukarno berusaha mengombinasikan solusi politik dengan solusi administratif. Solusi politiknya mula-mula adalah mendukung konsep Golongan Karya (Golkar) dengan harapan bahwa organisasi-organisasi massa bisa melepaskan diri dari affiliasi partai dan menjadi sebuah gerakan massa yang bersatu. Tetapi upayanya tidak berhasil.

Sejak tahun 1962, Sukarno lebih mendorong konsepsi Nasakom dan Front Nasional. Dia kembali kepada tulisannya di tahun 1926 untuk berusaha menyatukan Islam (progresif), nasionalis (progresif) dan Marxis (non-sektarian). Sesudah tahun 1962, gerakan mobilisasi massa mendukung Sukarno semakin membesar. Membesarnya gerakan itu, yang disertai dukungan ide-ide sosialisme ala Indonesia yang diusung Sukarno, agaknya menjadi solusi yang diharapkan bisa memecahkan kebuntuan situasi politik nasional. Tetapi Sukarno tetap memberlakukan sanksi administratif, yakni larangan terhadap PSI, Masyumi dan Murba.

Bukan hanya itu, mulai 1959 ada proses penundaan terus-menerus mekanisme utama dari demokrasi parlementer, yakni pemilihan umum. Pada kurun 1959-1962, semua partai, termasuk PKI, selalu menuntut adanya Pemilu yang tertunda (dan ditunda-tunda) itu. Tetapi mulai sekitar 1962-1963, seolah-olah memang semua pihak sepakat tak perlu ada Pemilu lagi. Maka terciptalah sebuah mekanisme baru untuk mengatur perpindahan kekuasaan dari satu golongan kepada golongan lain. Pada 1963, didirikan Komando Tertinggi Retooling Alat Revolusi (Kotrar) langsung di bawah komando Sukarno, yang menggantikan Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang dipimpin Jenderal Nasution. Sejak ada Kotrar, konsep penggantian pemerintah diubah menjadi konsep Retooling Kabinet – artinya mereka yang dianggap datang dari golongan ‘kanan’ di dalam kabinet diganti dengan yang ‘kiri’ atau progressif.

Cara demikian sebetulnya jebakan, karena secara formal semua menjadi tergantung pada Presiden Sukarno. Di luar proses formal, kuncinya adalah memang sejauh mana ide-ide sosialisme ala Indonesia mendapat dukungan. Selama dukungan mayoritas rakyat menjadi sasaran, proses ini memiliki sifat demokratis. Tetapi tanpa proses pemilu, ini merupakan proses demokratis tanpa tersedianya mekanisme demokratis, yaitu mekanisme formal yang memang bersandar pada rakyat sendiri. Semua bersandar pada presiden. Juga sangat susah membayangkan proses demokratis langsung – yaitu insureksi bersenjata oleh rakyat mayoritas, karena mereka tidak memiliki senjata.

Sementara itu presiden juga tidak punya kekuasaan atau kekuatan absolut. Apakah kabinet bisa diretooling atau tidak, banyak tergantung pada kalkulasi imbalan kekuatan. Kalkulasi dan manuver menjadi sebuah mekanisme utama yang menciptakan suasana yang penuh kehati-hatian dan manuver yang sangat matang untuk segala macam konspirasi.

Demokrasi liberal memang banyak cacatnya dan banyak mendapatkan kritik dari Sukarno. Dalam hal itu dia benar. Yang harus dipertanyakan adalah solusi yang ditawarkan Sukarno: sebuah sistem politik formal yang membuang semua aspek positif dari demokrasi liberal: tak ada Pemilu, pelarangan partai-partai dan bahasa politik yang tunggal. Dengan begitu sebuah gerakan memperjuangkan sosialisme ala Indonesia – yang pada hakekatnya bersifat demokratis dan juga melibatkan jutaan orang ke dalam kehidupan politik negeri – berkembang tanpa mekanisme formal demokratis. Situasi seperti itu berujung pada pertarungan konspirasi gelap dan memuncak di tahun 1965, yang membuka kesempatan untuk kubu lawan Sukarno untuk mengalahkannya secara total.***

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di Majalah Historia Online. Diterbitkan ulang di laman indoprogress.com pada 21 Juli 2011: <http://indoprogress.com/2011/07/sukarno-yang-dikalahkan-total/>

V

Penghianatan Marhaenis Terhadap Marhaenisme: Sebuah Kesaksian

Mastono

SUKARNO memang tidak seberuntung Karl Marx. Si bung tidak pernah memiliki sahabat semulia Friedrich Engels, yang mau menghabiskan masa tuanya demi melanjutkan dan mesistematisasikan karya-pemikiran Marx. Meskipun sepeleh dan mungkin terdengar romantik, tapi barangkali ini salah-satu yang membuat Sukarno benar-benar tenggelam kala De-Sukarnoisasi digalangkan Orde Baru. Tidak ada yang meneruskan mimpi Sukarno, tidak ada kajian lebih lanjut atas karya-pemikirannya, tentu dengan bobot yang tidak asal jadi. Jangankan disistematisasikan, seperti yang dilakukan Engels atas karya-pemikiran Marx, pembacaan atas teks Sukarno pun seringkali dilakukan dengan penghianatan.

Di antara perbedaan itu, Sukarno dan Marx punya kesamaan: pemikirannya dibelokkan sedemikian rupa dengan sangat parah. Pemikiran Marx tentang komunisme, misalkan, dipahami sebagai apapun sebagai kepemilikan bersama: bebek saya adalah milik bersama semua orang, bahkan istri saya adalah milik semua orang. Padahal komunisme yang demikian telah dikritik oleh Marx berabad-abad sebelumnya sebagai komunisme mentah. Namun, demi kepentingan untuk membinasakan Marxisme dari muka bumi ini, pembelokkan se-munafik itu dilakukan dengan suka-cita. Hal ini dapat kita lihat dari cara Orde Baru membentuk opini masyarakat tentang komunis, dan saya mendengar ‘definisi komunisme’ tersebut dari seorang laki-laki tua berusia 65 tahun.

Karena kepentingan yang sama, pemikiran Sukarno pun diobok-obok. Marxisme segera diceraikan dari Marhaenisme. Bahkan, kita tahu, nama Sukarno sendiri sampai dicabut sebagai bapak Marhaenisme. Oleh siapa semua itu dilakukan? Oleh orang-orang yang dahulunya menyan-

jung-nyanjung Sukarno, oleh mereka yang menggunakan partai yang didirikan oleh Sukarno, oleh gerombolan yang bahkan mengaku Marhaenis. Sukarno merupakan ke-ironis-an yang menyedihkan. Di akhir-akhir hidupnya, ia ditahan dengan cara yang lebih kejam dari pemerintah kolonial menahannya.

Saya teringat pernyataan Sudisman dalam Uraian Tanggung Jawab-nya, yang menceritakan detik-detik ia ditangkap tentara Indonesia bahkan lebih kejam dari ketika tentara Jepang menangkapnya. Ya, bangsa kita seringkali lebih kejam memperlakukan sesamanya dari bangsa lain memperlakukan bangsa ini. Barangkali ini yang membuat Pramoedya Ananta Toer tidak pernah mau saling memaafkan untuk kekejaman '65.

Sebenarnya, banyak sekali yang telah diobok-obok dari pemikiran Sukarno. Namun, tentu saja, untuk menguraikan dan menyajikan itu semua membutuhkan waktu yang sangat lama dengan kerja yang serius dan melelahkan. Perlu dilakukan pembacaan lebih mendalam dan sistematis atas karya-karya Sukarno dan kondisi historis konkrit yang mengondisikannya. Begitu pula kondisi historis yang telah membuat pemikirannya kian-kabur—bila perlu tanpa tedeng-aling-aling tunjuk hidung yang melakukannya. Dari kesulitan ini, saya harus berterima-kasih kepada IndoPROGRESS yang telah menjadikan Sukarno dan pemikirannya sebagai tema perbincangan beberapa hari ini. Tulisan-tulisan tersebut, semoga bisa memancing lebih jauh lagi kajian atas pemikiran Sukarno.

Dalam tulisan ini, saya ingin berbagi pengalaman saya berada dalam lingkungan organisasi yang menyebut diri sebagai pengikut ajaran Sukarno, namun di dalamnya banyak sekali pembacaan atas teks Sukarno yang justru membunuh Sukarno sendiri. Ada tiga hal besar yang akan saya bicarakan di sini: pertama, terkait bagaimana pembacaan atas 'siapa Marhaen' yang terombang-ambing. Kedua, terkait bagaimana sosio-nasionalisme diimplementasikan dalam kaitannya dengan program bergengsi Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Bela Negara. Ketiga, persoalan pilihan strategi gerakan yang dipilih oleh golongan Marhaenis—tentu yang saya bicarakan—telah mereduksi habis tujuan Marhaenisme itu sendiri.

Siapa Marhaen?

Jika ditanya, apa yang memungkinkan Sukarno mengelaborasi Marhaenisme? Tentu saja, jawabannya tidak bisa lain: Marhaen. Marhaen yang dimaksud tidak hanya sebatas yang telah diceritakan oleh Sukarno dalam Penyambung Lidah Rakyat, yang mendefinisikan Marhaen sebagai nama petani yang memiliki sedikit alat produksi tapi dimiskinkan oleh sistem. Inilah yang unik dari Sukarno dan mesti diperhatikan dengan baik. Ia sering menggunakan bahasa yang dibuat sedemikian rupa dipahami oleh rakyat, sehingga ia pun sering menggunakan cerita-cerita sebagai alat untuk menyampaikan pemikirannya, bahkan ia pun menggunakan personifikasi untuk menggambarkan realitas yang luas. Yang terakhir ini kita bisa melihatnya dari Marhaen dan Sarinah. Keduanya personifikasi yang diangkat guna menggambarkan realitas yang lebih luas.

Menyandarkan diri pada abstraksi yang dibangun di atas cerita Marhaen sebagai person dalam Penyambung Lidah Rakyat memiliki dampak yang menggelikan, yakni perdebatan perbedaan Marhaen dan proletar. Untuk yang ini, organisasi marhaenis tempat saya bernaung dahulu hampir setiap kaderisasi penerimaan anggota baru muncul pertanyaan: apa bedanya marhaen dan proletar? Peserta kaderisasi—dan jujur termasuk saya waktu itu—dengan begitu lantang menjawab: kalau Marhaen punya alat produksi, kalau proletar tidak. Padahal, dalam Dibawah Bendera Revolusi sudah dijelaskan bahwa proletar masuk sebagai kategori Marhaen. Rudi Hartono dalam tulisannya Sukarno dan Marxisme¹ telah cukup baik menjelaskan hal tersebut.

Saya hanya akan menambahkan sedikit di sini. Pertanyaan tersebut muncul tentu berangkat dari gagal-nya memahami pengertian Marhaen itu sendiri. Marhaen masih dilihat sebagai person yang mewujudkan dalam sosok petani. Ini membuktikan, organisasi yang mengangkat Marhaenisme sebagai azasnya pun bahkan abai terhadap kondisi yang dihadapi Sukarno pada kala itu di Hindia-Belanda. Di sini terlihat pula gagap metode dalam melihat basis pemikiran Sukarno.

1 Lihat artikelnya di halaman 14 buku ini

Padahal, jika saja pembacaan atas pengertian Marhaen mau sedikit lebih teliti, kita dapat memulai dari titik pijak yang telah dianjurkan oleh Sukarno sendiri. Sukarno mengatakan, kalau hendak ingin mempelajari Marhaenisme seseorang harus mengetahui kondisi Indonesia dan sedikit tentang Marxisme. Sebenarnya dua hal itu memiliki kesaling-hubungan yang tak terpisah satu sama lain. Kondisi Indonesia sebagai realitas objektif yang akan dihadapi guna dikaji. Sementara sedikit Marxisme yang dimaksud adalah inti dari Marxisme itu sendiri, materialisme dialektika dan materialisme historis. Rudi Hartono benar, bahwa Sukarno menggunakan analisis kelas—yang oleh sebagian Marhaenis masih bertukar-tukar dengan perjuangan kelas (akan saya bahas di bagian selanjutnya)—tentu saja pangkalnya adalah MDH.

Tesis materialisme historis, basis mengondisikan superstruktur, misalnya bisa dilihat dengan begitu terang dalam tulisan-tulisan Sukarno di DBR; bagaimana ia menyimpulkan suatu sikap yang mesti diambil rakyat selalu berangkat dari analisa ekonomi-politik, bahkan menurut saya penyajian tulisan Sukarno pun mencerminkan penerapan metode materialisme historis. Lebih jauh, dalam Sarinah, Sukarno menyatakan bahwa penindasan dan perubahan hukum yang mengatur hubungan perempuan dan laki-laki semuanya dikondisikan oleh ekonomi-politik, bukan moralitas dan lain-lain. Namun, sayangnya, Marxisme berusaha dihabisi dari Marhaenisme, hingga akhirnya metode Marhaenisme itu sendiri menjadi ngalor-ngidul dan menemukan bentuk anehnya dalam rumusan metode berpikir Sukarno/marhaenis.

Di sini jelas, pengertian Marhaen yang membedakannya dari Proletar telah melenyapkan kondisi Indonesia sebagai ontologi dan sedikit Marxisme sebagai metodologi (epistemologi). Dengan mengabaikan kedua hal tersebut, Marhaenisme justru menjadi naif dalam menghadapi kenyataan sejarah. Seolah-olah Marhaenisme menampik keberadaan Proletar yang lahir dari rahim kapitalisme dan satu-satunya kelas yang berpotensi merobohkan kapitalisme. Ironisnya, hal ini justru disadari betul oleh Sukarno sebagaimana yang ia tuliskan dalam Marhaen dan Proletar.

Sehingga, kita patut bertanya dengan menunjuk hidung orang yang masih membedakan Marhaen dan Proletar: ada kepentingan apa di balik pem-

bedaan tersebut? Jangan-jangan ini adalah upaya yang sengaja dilakukan guna melestarikan 'kematian' Sukarno.

Kesalahan lain terkait pengertian Marhaen muncul dalam pernyataan: marhaen hidup sebenggol sehari. Pernyataan ini hendak merumuskan bahwa seseorang bisa dikatakan Marhaen hanya bila hidup sehari sebenggol. Kesalahan ini begitu konyol karena dua hal. Pertama, pernyataan ini muncul karena pembacaan yang ngawur atas tulisan Sukarno *Orang Indonesia Tjukup Nafkahnja Sebenggol Sehari?*. Padahal, dalam tulisan tersebut Sukarno hanya memaparkan kondisi Marhaen dalam kondisi tertentu, yaitu masa krisis atau yang ia sebut dengan term zaman mleset. Artinya, Marhaen yang hidup dengan sebenggol sehari tidak berlaku untuk semua rentang waktu. Dalam kata lain, Sukarno tidak hendak merumuskan suatu ukuran matematis untuk Marhaen, sama seperti ketika World Bank merumuskan patokan matematis untuk seseorang dikatakan miskin. Marhaen harus dilihat dengan metode MDH yang bermuara pada analisis kelas, bukan ukuran matematis seperti itu. Marhaen tetap ada selama kondisi yang melahirkannya ada, yaitu kapitalisme-imperialisme/kolonialisme dan feodalisme.

Kekenyolan kedua, pengertian tersebut membuat diskursus lanjutan yang sayangnya sia-sia, yakni pencarian ukuran sebenggol sehari jika dikonverter dalam rupiah saat ini bernilai berapa. Pernah seorang alumni organisasi saya bahkan sampai berkata pahit: "World Bank saja bisa merumuskan ukuran untuk orang dikatakan miskin, masa kita sebagai Marhaenis tidak bisa (dengan merumuskan nilai sebenggol dalam rupiah saat ini)". Pernyataan pahit yang membikin saya tersedak-sedak tertawa jika mengingatnya.

Sangat miris, Marhaen yang merupakan prasyarat bagi Marhaenisme sekaligus kaum yang hendak dibela dan diperjuangkan oleh Marhaenisme harus dengan sedemikian payah dimengerti oleh orang-orang yang mengaku diri Marhaenis. Pertanyaan menggelikan yang kemudian mesti diajukan, dengan begini, adalah lantas siapa yang mau dibela?

Sosio-nasionalisme dan Bela Negara

Beberapa waktu yang lalu saya pernah menuliskan opini Bela Negara di IndoPROGRESS dan saya tidak menyangka tulisan tersebut menuai kritik yang nyinyir sekaligus menjijikkan: “nasionalis kok menolak Bela Negara”. Entah yang berkata demikian memang sudah membaca tulisan saya atau belum, namun menurut pengakuan teman yang lain orang tersebut memang kini sedang mengupayakan membuat pelatihan Bela Negara. Dengan demikian, saya bisa menarik kesimpulan, orang tersebut memang fans Bela Negara. Meskipun tidak penting tapi pernyataan tadi mesti dibongkar, untuk membuktikan bahwa penganut Marhaenisme yang juga pasti menganut sosio-nasionalisme macam saya dan orang yang nyinyir tadi tidak bisa mendukung program Bela Negara, jika memang benar-benar menyandarkan argumen pada sosio-nasionalisme

Sukarno pernah berkata dalam salah-satu tulisan di Dibawah Bendera Revolusi, bahwa yang terpenting dari nasionalismenya adalah rakyat. Inilah sebabnya, bagi Sukarno, sosio-nasionalisme harus menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera yang terbebas dari segala praktik penghisapan dan penindasan seperti kapitalisme dan feodalisme. Ini yang dimaksud dari istilah *humanity* dalam pernyataan Sukarno ketika menyitir Mahatma Gandhi, “my nationalism is humanity”. Seperti juga yang ia ungkapkan dalam pidato tahun 1959, semua orang di bawah atap langit tidak ingin ditindas baik oleh bangsa lain maupun bangsanya sendiri. Alasan ini pula yang memungkinkan Sukarno yang nasionalis itu menolak kapitalisme bangsa sendiri dengan begitu tegas.

Dengan rumusan yang seperti itu, sosio-nasionalisme bertujuan untuk menjungkirbalikkan kapitalisme dan mencipta sosialisme Indonesia. Sehingga, terang saja, siapa pun yang ikut menindas Marhaen, baik bangsa sendiri maupun bangsa asing mesti dilawan. Pertanyaannya: siapa ‘negara’ yang akan dibela melalui program Bela Negara? Dan apakah ada dalam program Bela Negara yang hendak membebaskan rakyat dari belenggu kapitalisme dan feodalisme? Sementara kita sendiri tahu siapa Ryamizard Ryacudu, orang yang pernyataannya bahkan seringkali tidak logis sama sekali. Kita tahu pula, bagaimana program Bela Negara dibikin dari imajinasi Angkatan Darat yang sedang phobia dengan proxy war. Kita juga tahu, itu

semua hanya omong-kosong belaka.

Bagi saya, pembelaan terhadap program Bela Negara yang dilakukan oleh orang yang berasal dari organisasi yang memegang Marhaenisme adalah penghianatan atas Marhaenisme itu sendiri. Dengan begitu, ini penghianatan terhadap Sukarno. Ini adalah pembunuhan kesekian kalinya dari Sukarno. Di sini saya mengecam semua Marhaenis yang mendukung, apalagi jika merumuskan dan ikut membuat terlaksananya program Bela Negara!

Menyoal Artikulasi Gerakan Marhaenis

Saya mengamati, kebanyakan orang yang sudah purna-pengurusan dari organisasi saya sebagian besar meneruskan perjuangan ke elit-politik. Bahkan pilihan ini terkesan seragam, dengan pilihan yang juga kebanyakan sama: bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP). Tidak salah dengan ikut partai dan tidak salah juga berjuang di wilayah elit-politik. Tidak bisa dipungkiri hal itu memang sangat diperlukan.

Akan tetapi yang jadi persoalan adalah jika pilihan ini menjadi pilihan yang hampir seragam. Lebih jauh lagi, pilihan bertarung dalam konteks elit-politik itu tidak diiringi dengan pengorganisasian rakyat. Bahkan, saya melihat, para Marhaenis ini ujung-ujungnya sama saja dengan politisi lain yang menjadikan rakyat hanya sebagai konstituen dalam kemenangan Pemilu. Sehingga, wajar saja jika dengan sekian banyak golongan Marhaenis ini menceburkan diri ke elit-politik dan meraih kursi, tapi tidak ada dampak apapun yang signifikan bagi upaya pembangunan sosialisme Indonesia. Justru yang ada, sesama Marhaenis ini saling sikut satu sama lain demi kepentingan menjaga kursi dan konstituennya tetap aman.

Dengan demikian, alih-alih menceburkan diri ke wilayah perjuangan elit-politik menjadikan gerakan menemukan celah-celah di sana, justru sebaliknya, perilakunya sendiri menjadi kian elitis. Ini ibarat orang yang ingin menasehati orang lain untuk berhenti mengonsumsi minum-minuman keras, tapi ketika ditawarkan dia menerima dan justru menjadi pema-bok yang lebih parah dari yang dinasehatinya. Alih-alih menjadikan partai sebagai alat guna merebut kekuasaan dan menegakkan Sosialisme Indone-

sia, para Marhaenis ini justru menjadi kacung partai dan penyembah kursi kekuasaan. Setidaknya, keterangan ini saya dapatkan dari seseorang yang ikut menceburkan diri dalam pertarungan tersebut.

Dengan demikian, semakin nyatalah perjuangan yang disebut bertujuan untuk menegakkan Marhaenisme justru mereduksi habis visi Marhaenisme itu sendiri. Marhaenisme bertujuan mendirikan Sosialisme Indonesia yang otomatis berhadapan langsung dengan kapitalisme, apakah bisa dibangun dengan artikulasi gerakan yang hanya bersandar pada wilayah elit-politik yang bahkan telah menjadikan dirinya elitis? Bisakah kapitalisme dibunuh hanya dengan jalur parlementer tanpa revolusi? Bisakah revolusi terwujud tanpa kekuatan massa-rakyat?

Ya, di tangan para Marhaenis ini Marhaenisme hanya dijadikan sekadar sebagai kumpulan slogan yang dikutip dari DBR guna menghiasi status facebook, twitter, dan poster-poster. Sukarno tidak lebih hanya sosok yang diagungkan sedemikian rupa personifikasinya tapi dibunuh visi pemikirannya. Sukarno hanya dijadikan pelengkap spanduk ketika mereka mencalonkan diri menjadi wakil rakyat guna meraup suara. Sukarno dan Marhaenisme hanya menjadi pemanis bibir yang dibicarakan sampai semalaman suntuk sambil minum kopi, namun esoknya lupa.

Dahulu menceburkan diri di wilayah elit politik dengan alasan perjuangan. Saat ini sulit rasanya percaya bahwa itu benar-benar perjuangan. Pantaslah saja, jika pereduksian terhadap pengertian Marhaen dibiarkan, pereduksian implementasi sosio-nasionalisme menjadi Bela Negara dianggap biasa dan bahkan harus. Nyata-nyatanya, di tangan para Marhaenis ini, Marhaenisme dianggap tidak penting dan tidak lebih daripada dongengan indah masa lalu yang hanya patut dilestarikan sebagai penghibur adek-adek mahasiswa yang masih menggebu-gebu, untuk kemudian dimanfaatkan sebagai pendukung setianya.

Para Marhaenis yang masih sadar betul arti penting Marhaenisme, yang masih paham betul arti penting rakyat, perlu lebih berani untuk muncul kepermukaan menyuarakan yang selama ini salah serta mengampanyakan saatnya kita melupakan para Marhaenis lapuk itu. Dan sudah saatnya Marhaenis bergabung dengan Marxis dan Islam-Progresif yang lebih da-

hulu mendahului kita.

Sukarno benar, bahwa untuk membuat Indonesia merdeka kita harus ber-satu. Seperti kata Zely Ariane,² kita butuh semua orang untuk menang. Semua orang yang tahu lawan dan kawan.^{***}

Artikel ini sebelumnya telah terbit di laman indoprogress.com, 22 Maret, 2016: <http://indoprogress.com/2016/03/penghianatan-marhaenis-terhadap-marhaenisme-sebuah-kesaksian/>

² Zely Ariane (2015), *Untuk Mengubah Semua Hal Kita Perlu Semua Orang*, <http://indoprogress.com/2015/05/untuk-mengubah-semua-hal-kita-perlu-semua-orang/>

VI

Bung Karno dan Bahaya Pemfosilan

Ben Anderson

TIDAK lama setelah Bung Karno meninggal, saya terima surat dari seorang teman. Teman ini sangat marah kepada si Pemimpin Besar Revolusi. Ia ikut aktif dalam penghancuran terhadap Demokrasi Terpimpin, karena merasa kedua-duanya otoriter, merusak ekonomi Indonesia, melaratkan orang kecil, dan memberi angin kepada Partai Komunis Indonesia (PKI). Didalam surat itu dia cerita betapa dia heran, ketika jenazah Bung Karno dibawa secara khidmat sepanjang jalan-jalan raya di Jakarta, mendadak dia mulai nangis tersedu-sedan. Dan teman ini tidak bisa menjelaskan mengapa air mata membasahi pipinya. Tetapi saya sendiri menduga bahwa sebenarnya dia cinta sama Bung Karno dan sekaligus sangat kecewa dengan kesalahan-kesalahannya.

Sekarang, setelah lebih dari 30 tahun, sangat mungkin bahwa tidak ada orang lagi yang marah pada Bung Karno, karena kemarahan itu sudah terberai di bawah ombak-ombak raksasa kemarahan-kemarahan yang lebih baru dan lebih sengit. Tetapi cinta itu tak pernah padam. Cuman kadang-kadang berubah menjadi pemujaan, seolah-olah Bung Karno adalah semacam dewa atau raja besar, bukan seorang manusia biasa yang juga luar biasa. Dengan demikian, sebagian dari pikirannya yang masih segar dan tepat pada situasi ketika dicetuskan, lama-lama memfosil menjadi “wejangan” yang dikira kebal terhadap Sang Batara Kala.

Dalam hal ini pikiran-pikiran Bung Karno mengalami nasib yang mirip pemfosilan tertentu terhadap pikiran-pikiran perintis Islam moderen di Indonesia, Kyai Haji Dahlan; perintis revolusi Marxis sedunia, Vladimir Lenin; perintis pengglobalisasian agama Nasrani, Santo Paulus; dan banyak lain. Untuk bangsa Indonesia yang sedang dalam krisis besar seperti sekarang ini, rasanya segala macam fosil (pikiran yang sudah membatu) justru berbahaya. Juga cinta yang bau kemenyan.

Kalau Bung Karno bukanlah titisan dewa, toh harus diakui bahwa lelakonnya banyak dibentuk oleh Dewi Sejarah, yang nama jalanannya Si Andai. Seandainya Bung Karno lahir pada tahun 1881, bukan pada tahun 1901, tak mungkin dia mendapat pendidikan HBS yang terbaik di Hindia Belanda. Tak mungkin lulus dari ITB cetakan pertama, dan tipis kemungkinan menjadi Presiden pada tahun 1945, karena sudah berusia 64 tahun, yang untuk orang Indonesia pada masa itu, terhitung tua banget.

Dengan lahir pada tahun 1901, dia juga beruntung sekali menjadi ahli waris perintis-perintis besar gerakan-gerakan pembebasan di Asia dan di Timur Tengah: José Rizal, pahlawan dan martir nasional Filipina lahir pada tahun 1861, dan dieksekusi penjajah Spanyol 5 tahun sebelum Bung Karno sempat melihat dunia kita. Sun Yat-sen, tokoh besar nasionalisme Tionghoa, lahir pada tahun 1866, dan meninggal dua tahun sebelum PNI dibentuk. Mahatma Gandhi lahir pada tahun 1869, dan sudah terkenal di seluruh dunia ketika Bung Karno masih bocah ingusan. Malahan Kemal Pasha (Ataturk), yang lahir pada tahun 1881, menjadi Presiden Negara Nasional Turki ketika Bung Karno masih senang-senang di bangku HBS.

Dan dia baru empat tahun umurnya ketika Jepang menjadi negara Asia pertama yang bisa mengalahkan bangsa Eropa (Rusia dalam kasus ini) di medan peperangan. Bung Karno mengagumi tokoh-tokoh ini, belajar dari perjuangannya, dan dengan demikian merasa bahwa gerakan kemerdekaan Indonesia harus menjadi satu bagian dari gerakan emansipasi dari seluruh dunia jajahan. Disitu tertanam suatu kesadaran global yang belakangan berbunga dalam bentuk Konferensi Bandung dan gagasan *New Emerging Forces (Nefos)*.

Si Andai masih punya peranan lain lagi yang perlu disebut. Kebetulan, revolusi Marxis pertama meletus di St. Petersburg ketika Bung Karno masih *sweet sixteen*, usia mana biasanya penuh idealisme, dinamisme, dan romantika. Dan sampai tua, Bung Karno masih suka bicara tentang romantika revolusi, suatu bahasa yang lain sekali dari bahasa angkatan Marxis muda bangsanya Aidit, Lukman, Nyoto, dan Sudisman, yang menjadi dewasa ketika gerakan orang Bolshevik 1917 sudah lama memfosil di bawah kediktaturan kejam Josef Stalin. Menjadi Marxis pada tahun 1920an belum berarti menjadi anggota aparat tertentu, tetapi hanya bersedia diil-

hami uraian jitu Karl Marx dan Vladimir Lenin tentang kapitalisme dan imperialisme global, dan ikut bergerak di lapangan politik yang praktis.

Dalam hal ini, Bung Karno sama sekali tidak sendirian. Hampir seluruh angkatan dipengaruhi visi Marxis dalam batas berbeda-beda. Untuk angkatan ini, sosialisme mirip mata hari yang sedang naik megah jauh nun di ufuk Alam. Seandainya dia lahir pada tahun 1881, mungkin sekali tidak demikian. Dan kalau di 1921, yah, ketika dia dewasa sosialisme bukan lagi impian umum, tetapi menjelang menjadi monopoli politik kubu-kubu tertentu.

Dan kebetulan lagi Bung Karno lahir sebagai anak dari seorang priyayi kecil Jawa dan seorang putri dari Pulau Dewata (yang baru saja ditaklukkan keseluruhannya oleh imperialis Belanda). Pada masa itu, pribumi campuran macam ini cukup jarang, apalagi di kalangan terdidik. Tokoh-tokoh lain dari angkatan hampir semuanya Padang tulen, Jawa totok, Sunda turun-temurun, dan sebagainya. Mungkin hanyalah kelompok Tionghoa peranakan sudah bisa menjadi orang campuran dengan kebudayaan cam-purnya.

Bisa diduga bahwa sebagian karena pola keluarganya, Bung Karno bisa cepat melepaskan diri dari segala sukuisme yang picik, dan memeluk gagasan nasionalisme yang luas. Tetapi, mungkin juga, asal campurannya membuka matanya kepada perlunya perkembangan sehat kebudayaan-kebudayaan dan swasembadanya para daerah di kepulauan raksasa yang namanya Indonesia.

Kebetulan satu lagi juga penting. Adalah ironis bahwa perkawinan yang melahirkan Bung Karno sekarang ini, kalau tidak mustahil menurut Undang-Undang Perkawinan, toh cukup *angel*. Jadi munculnya Bung Karno di dunia yang fana ini dimungkinkan oleh keadaan dimana sinkretisme masih biasa di Nusantara dan belum ada dinding angker-tebal antara kelompok-kelompok. Salah satu tanda sinkretisme yang mendalam itu ialah bahwa pemberontakan PKI terhadap Belanda pada tahun 1926-27 terjadi di dua daerah, Sumatra Barat dan Banten, yang terkenal kuat Islamnya.

Jadi, bukan saja pikiran-pikiran Bung Karno berwarna sinkretis, tetapi untuk sementara warna itu juga mencerminkan sebagian besar kebudayaan-kebudayaan pribumi. Betapa pentingnya corak masyarakat Nusantara ketika itu untuk mungkin karir politiknya Bung Karno bisa dilihat kalau dibandingkan dengan nasibnya Mahatma Gandhi dan nasionalismenya India Raya. Boleh dikatakan, secara gampang, bahwa Islam masuk India Raya dengan pedangnya penyerbu-penyerbu dari Afghanistan, dan dari abad ke-13 sampai pertengahan abad ke-19, raja-raja penting dan kelas penguasa sebagian besar berasal dari minoritas Islam, sedangkan mayoritas rakyatnya beragama Hindu. Tetapi imperialis Inggris akhirnya menghapuskan dinasti Mughal yang Islam, dan berangsur-angsur mendirikan sistem politik baru berdasarkan hak pungut suara dalam pemilihan. Dengan sendirinya perubahan-perubahan itu menimbulkan kemarahan di kalangan mantan-penguasa Islam yang takut akan jatuh menjadi minoritas tanpa privilese-privilese. Dari situ timbul ketegangan-ketegangan sosial yang makin menjadi, sehingga akhirnya India Raya terpaksa pecah menjadi dua negara yang terpisah, India Kecil dan Pakistan, bukan tanpa pembunuhan massal antara kaum Muslimin dan kaum Hindu. Gandhi sendiri, walaupun Hindu tulen, punya pikiran luas dan berusaha keras untuk mencegah malapetaka ini; dengan akibat bahwa dia sendiri dibunuh oleh seorang teroris fanatik yang menganggap tokoh besar itu sudah mengkhianati umat Hindu.

Di Indonesia, sebaliknya, Islam masuk berangsur-angsur dan pada umumnya secara damai melalui para pendakwah partikelir dan pedagang maritim. Berangsur-angsur juga kerajaan Hindu-Budha hilang atau mengubah diri menjadi Islam; dan lembaga-lembaga resmi agama lama lenyap. Toh dalam proses yang memakai beberapa abad ini, sinkretisme sangat menyolok. Kepercayaan-kepercayaan animis dan Hindu-Budha tetap hidup kuat, seperti dibuktikan oleh popularitas cerita Mahabharata dan Ramayana, bukan hanya di Jawa, Sunda, dan Madura tetapi juga di semenanjung Melayu. Dengan demikian, tidak ada dinding agama antara penguasa dan rakyat. Diponegoro bisa memakai simbol baik Islamiyah maupun kejawen untuk mendirikan *bolonya*. Pada abad ke-19, mungkin hanyalah di Sumatra Barat terjadi peperangan dahsyat (Perang Paderi) berdasarkan afiliasi agama.

Dengan demikian, Bung Karno, paling sedikit pada masa mudanya, bisa meneruskan politik sinkretisnya, yang terbuka untuk semua unsur agama, tanpa menghadapi nasibnya si Mahatma. Sampai Bung Karno tutup usianya, Republik Indonesia tetap utuh.

Toh lama-lama Indonesia masa mudanya tak bisa luput dari perubahan-perubahan yang berangsur-angsur menggerogoti sinkretisme lama itu. Dan pengotakan makin menjadi-jadi. Misionaris, baik Muslim maupun Nasrani, berusaha untuk menghapuskan apa saja yang dianggap takhayul sisa zaman purba yang primitif. Pendidikan negara sekuler yang makin meluas juga makin memojoki pandangan-pandangan lama. Makin melek huruf masyarakat makin terbaca tulisan-tulisan yang menjunjung patokan standar dan internasional.

Kyai terpaksa mundur menghadapi jurnalis dan intelektual berhaluan Islam modern yang bersih takhayul. Orang Marxis condong mau membersihkan diri dari manusia tipenya Haji Misbach, Semaun dan Tan Malaka, dan mengikuti garis internasional versi Moskow atawa Peking. Dan pada jamannya Babe (baca: Soeharto) setiap orang Indonesia harus punya agama yang berkitab (standar), dengan kepercayaan yang sinkretis terpukul ke luar gelanggang resmi.

Bung Karno berusaha membendung de-sinkretisasi yang mendasar ini dengan sekuat tenaganya, tetapi tidak selalu secara bijaksana. Akibat Darul Islamnya Sekarmadji Kartosoewirjo, Peristiwa Tjikini, macetnya Konstituante, dan juga PRRI, dia makin curiga kepada sebagian Muslim modernis, tanpa cukup membedakan antara yang moderat dan yang berkepala batu. Justru NU yang sinkretislah yang disenanginya. Larangan terhadap Masyumi (sebagai keseluruhan), ternyata *beleid* yang gegabah yang sia-sia dan berakibat buruk jangka panjang. Pun terhadap PKI, dia hati-hati terhadap standardisasi. Tan Malaka, momoknya PKI Aidit, dijadikan Pahlawan Nasional. Dan pada akhirnya terasa sekali bahwa Bung Karno paling suka kepada Nyoto, yang dianggapnya tokoh PKI yang paling luwes dan sinkretis. Menurut kabar angin, Bung Karno ingin supaya Nyoto (yang ketika itu mengalami banyak masalah intra-partai) mendirikan partai marxis (sinkretis-nasionalis) di luar PKI-standar. Tapi akhirnya semua usaha ini gagal, dalam malapetaka 1965-66 yang mengingatkan kita pada malapeta-

ka yang dialami Gandhi duapuluh tahun sebelumnya.

Bagaimanapun juga harus diingat bahwa, walaupun Bung Karno menjadi ahli waris sinkretisme lama dan asli, dia juga seorang politikus moderen, sehingga dalam tangannya sinkretisme mendapat bentuk baru, yang tidak sesinkretis leluhurnya. Gejala ini sudah terlihat jelas dalam karangannya yang terkenal dan hebat: *Nasionalisme, Islam dan Marxisme*. Dari judulnya saja, apalagi isinya, nampak sekali bahwa paling sedikit Islam dan Marxisme dianggap sebagai kotak, atau mukim yang berdingding. Islam yah Islamlah tanpa variasi lokal, Marxisme yah Marxismelah, juga tanpa variasi lokal. Sampai batas tertentu, nasionalisme juga kena, karena baik Islam maupun Marxisme di Indonesia tak terlepas dari gerakan-gerakan Islam dan Marxis di dunia internasional. Jadi pengkotakan ini harus diatasi dengan sangat sadar dan berkepala dingin: sinkretisme terencana daripada sinkretisme alamiah. Dan alat untuk mengatasinya ialah nasionalisme yang mendalam dan meluas. Marhaenisme, saya menduga, bahwa tidaklah kebetulan kalau bunyi-mula kata ini sama dengan bunyi-awal Marxisme disebut, yakni sebagai Marxisme yang diterapkan kepada kondisi khas Indonesia. Ketika ide-ide ini dicetuskan, waktunya sangat tepat: PKI berantakan akibat pemberontakannya yang gagal, dan Sarekat Islam yang pernah raksasa sudah sekarat, dengan diganti oleh macam-macam organisasi Islam yang lebih kecil dan sering bersaing.

Dalam usaha yang besar itu, Bung Karno juga beruntung dari karunianya Si Andai.

Pada tahun 1930an, Presiden Manuel Quezon mengeluh bahwa pada 150 kilometer ke utara ibukota Manila, dia memerlukan penerjemah untuk bicara dengan rakyat setempat yang berbahasa Ilokano. Pada puncak kekuasaannya, pidato-pidatonya Ketua Mao Tse-tung di radio toh tidak dimengerti oleh mayoritas rakyat RRT, karena dia memakai bahasa Mandarin (dialek Peking dan sekitarnya) dengan logat Hunan yang tebal. Hal yang sama berlaku untuk Mahatma Gandhi.

Tapi di Hindia Belanda situasi bahasa sangat lain. Pada abad ke 17 dan 18 Jan Kumpeni terlalu pelit, dan pada abad ke-19 Negeri Belanda terlalu miskin, kecil, dan tak penting, untuk memaksakan bahasa Belanda di Nu-

santara, seperti bahasa Inggris dipaksakan ke India Raya dan bahasa Perancis kepada Senegal dan Pantai Gading. Karena itu, dari dulu kaum penjajah memakai bahasa Melayu blasteran sebagai bahasa administratif di seluruh daerah kekuasaannya. Dan pada akhir abad ke-19, bahasa campur aduk ini makin dibikin standar demi keperluan pendidikan modern untuk pribumi yang mulai didirikan. Sementara itu semacam Melayu pasaran berkembang dengan pesat di dunia pers, dipelopori oleh kaum Indo dan kaum Tionghoa peranakan (yang sebenarnya menjadi perintis kesusasteraan Indonesia modern). Walaupun ada koran dan majalah yang memakai beberapa bahasa daerah, termasuk bahasa Jawa, pada ketika Bung Karno lulus HBS, bahasa Melayu sedang mutlak menang baik di aparat administratif maupun di pasar bebas. Lebih bagus, dan lebih kebetulan lagi, bahasa pemenang ini bukanlah milik suku besar apapun di Nusantara. Sehingga gampang menjadi bahasa yang betul-betul nasional (paling sedikit kalau peranan Mbahnya si Jan Kumpeni dilupakan). Kebetulan juga, di antara bakatnya Bung Karno, tidak ada yang lebih khas dari bakat berpidatonya. Dengan demikian dia memakai hadiah Dewi Sejarah dengan sekuat tenaganya untuk menyebarkan bahasa nasional ini ke seluruh penjuru angin; dan sekaligus, dengan kata-kata yang manis, merangsang, lucu, dan mengharukan, mengajak para pribumi untuk mengubah diri dan kesadarannya menjadi anggota bangsa Indonesia yang baru itu. Dengan suaranya yang merdu-berat itu, Bung Karno menunjukkan cintanya pada sesama orang Indonesia (bukan sumber alam tanah leluhurnya) dan sekaligus mengajak mereka untuk mencintainya sebagai pemimpin dan wakil aspirasi mereka. Karena suara itu bisa didengar pun oleh mayoritas pribumi yang belum melek huruf, solidaritas nasional makin menjadi luas dan kukuh. Mungkin bisa dikatakan bahwa Bung Karno adalah pemimpin paling cocok untuk zaman radio.

Pada kedua dasawarsa antara apa yang biasanya bule sebut sebagai Perang Dunia Pertama dan Kedua, di Asia Selatan dan Asia Tenggara nampak sekali ada perbedaan penting antara *beleid* imperialis berbahasa Inggris dan yang berbahasa Perancis dan Belanda. Di Filipinanya Paman Sam, sistem demokrasi oligarkis dengan munculnya pemimpin hasil pemilu terbatas mulai ada sejak tahun 1900an. Sistem ini berkembang terus, sehingga pada tahun 1930an sudah ada presiden Indo, dan kemerdekaan dijanjikan untuk tahun 1945.

Di India Raya, yang sampai pertengahan tahun 1930an masih mencakupi Birma, pemilihan-pemilihan sudah melembaga, dan unsur-unsur demokrasi sudah tertanam. Setelah Birma dipisahkan dari India Raya (1937), tiga tokoh pribumi berganti-gantian menjadi perdana menteri sebelum balatentara Jepang masuk. Walaupun kemerdekaan tidak dijanjikan London, toh arus ke sana sudah terasa.

Sebaliknya di Hindia Belanda dan Indocina Perancis, sama sekali tak ada pemilihan yang berarti, dan kedua-duanya malahan menjadi negara intel-intelan, dimana kemungkinan kemerdekaan kelak kemudian tidak masuk di akal sang penjajah. Dengan demikian, kedua kawasan menjadi tanah yang subur untuk ide revolusi dan aktivitas di luar hukum kolonial, dan juga di bawah tanah.

Seandainya politik Belanda lain, atau seandainya orang Inggris menja-jahi Nusantara, bagaimana kira-kira karir dan ide-ide Bung Karno? Sulit dibayangkan bahwa dia tak merasa terpaksa ikut pemilihan-pemilihan umum, menjadi anggota parlemen, dan mungkin sekali menjadi perdana menteri, mirip U Saw di Birma. Walaupun sementara di bawah naungannya seorang Gubernur-Jendral. Buktinya, peranannya pada masa Jepang yang tak terlalu jauh dari peranannya Jose Laurel, Sr. di Filipina, dan Dr. Ba Maw di Birma. Tapi Belanda yah Belanda, dan mungkin karena itu seumur hidup Bung Karno secara pribadi tak pernah ikut langsung pemilihan umum dengan bersaing dengan tokoh-tokoh lain di kalangan pribumi.

Penyerbuan Jepang memusnahkan imperialisme Belanda dalam waktu hanya beberapa minggu. Tiga setengah tahun lagi imperialis Jepang dengan mendadak menyerah tanpa syarat akibat bom atom yang dijatuhkan di kota-kota malang Hiroshima dan Nagasaki. Belanda, yang barusan bebas dari cengkeraman Nazi Jerman, tak mampu langsung kembali ke takhtanya di Nusantara, sehingga meletus Revolusi Indonesia yang historis itu. Dari situ lama-lama timbul kemungkinan Bung Karno menganggap diri Pemimpin Besar Revolusi: — Berkat perjuangan rakyat Indonesia, tetapi juga berkat kebetulannya kejadian-kejadian yang menggemparkan pada bulan Maret 1942, dan awal Agustus 1945.

Yang menarik dalam perkara ini adalah sikap dan *beleid* Bung Karno pada

masa Revolusi itu. Diketahui bahwa setiap kabinet antara 1945 sampai 1949 — baik yang didominasi oleh golongan sosialis marxis maupun yang didominasi oleh golongan Islam moderen dan PNI mengambil jalan Diplomasi dengan Belanda, walaupun *beleid* ini ditentang oleh golongan yang ketika itu masuk blok oposisi. Dan Presiden Bung Karno? Dia bekerja sama dengan hampir semua golongan dan juga terus-menerus menyokong jalan diplomasi ini. Kalau membaca pidato-pidatonya di koran-koran pada masa Revolusi itu, yang pada umumnya tidak dimasukkan ke *Di Bawah Bendera Revolusi*, kita bisa melihat bahwa selain mengobarkan nasionalisme Indonesia, dia berusaha untuk menenangkan pergolakan massa tukang-tukang permogokan, kelompok-kelompok pro revolusi sosial, badan-badan perjuangan yang berkepala batu dan lainnya. Malahan pada Peristiwa Madiun, dia mengutuk PKI baru bikinan Muso, yang jauh lebih kiri dari golongan-golongan kirinya Amir Sjarifuddin, Setiadjit, Maruto Darusman, cs sebelumnya, dan sepenuh-penuhnya menyokong *beleid* kabinet Hatta dan Nasution untuk menumpasnya.

Setelah penyerahan kedaulatan pada akhir tahun 1949, sepengetahuan saya, dia tak pernah mengucapkan penyesalan atas eksekusi perdana menteri R.I. yang kedua dan kawan-kawannya. Begitulah, padahal Bung Karno terkenal sebagai orang yang tidak suka pembunuhan dan kekerasan-kekerasan lain.

Dalam tingkah lakunya Bung Karno selama Revolusi seperti digambarkan di atas, nampak sekali persetujuannya dengan sikap umum tokoh-tokoh nasionalis moderat. Mereka yakin bahwa TNI tidak bisa mengalahkan tentara Belanda di medan peperangan. Dan kalau ini berlaku untuk Jawa dan Sumatera, lebih lagi berlaku untuk Indonesia Timur. Jadi Indonesia baru akan mencapai kemerdekaan dengan diplomasi (tentunya dengan TNI dan badan-badan perjuangan sebagai kartu kuat dalam diplomasi itu). Mereka juga ingin supaya Indonesia Merdeka menjadi ahli waris sepenuhnya dari Hindia Belanda, dari Sabang sampai ke Merauke, bukan hanya Jawa-Sumatera-Bali saja.

Dan Indonesia Timur? Perlu diingat bahwa sedikit sekalilah tokoh-tokoh nasional yang kenal daerah yang sangat luas ini dengan dekat. Bung Karno sendiri pernah dibuang ke Flores, tetapi belum pernah ke Kalimantan, Ti-

mor, Sulawesi, Maluku, dan Lombok. Hatta dan Syahrir ditahan di Banda dan Tanah Tinggi, tetapi selain itu kekuperan mereka sama dengan kekuperan Bung Karno. Mereka tidak tahu sampai kemana nasionalisme Indonesia berkobar di Indonesia Timur, kecuali di Sulawesi Selatan dimana orang-orang Bugis dan Makasar melawan pendudukan Belanda dengan senjata dan banyak mengalami korban di tangan Westerling. Nah, kalau Belanda tak mungkin diusir dari Indonesia Timur, dan Indonesia Timur harus masuk Republik Indonesia Merdeka, tak ada jalan lain kecuali jalan perundingan. Sikap ini menunjukkan realismenya Bung Karno, disamping retorika yang romantis itu. (Salah satu sebab mengapa setelah 1950 isu Irian Barat/Papua Barat begitu penting di mata dia, ialah karena merasa *beleid* diplomasi itu akhirnya sebagian gagal, akibat akal-akalan Belanda dan grup tertentu di Washington.).

Perhitungan Bung Karno dan tokoh-tokoh nasional lain juga berdasarkan fakta bahwa setelah Perang Dunia ke-II, Amerika Serikat nongol sebagai negara yang paling kuat dan kaya di atas bumi manusia. Sampai kemenangan Ketua Mao pada tahun 1949, tak ada kekuatan apa-apa di Asia yang secara serius bisa bertandingan dengannya. Apalagi untuk negara berkepulauan seperti Indonesia, angkatan laut dan angkatan udara Amerika sama sekali dominan. Uni Soviet jauh lebih lemah dan letaknya sangat jauh. Jadi sokongan Washingtonlah yang harus dicari bukan permusuhannya. Mungkin sekali bahwa perhitungan ini menjadi salah satu faktor kunci yang membuat Bung Karno menjadi penyokong *beleid* menghancurkan PKInya Muso, yang seolah-olah nongol dengan mendadak di Indonesia sebagai utusan Moskow.

Menarik, dalam perkara ini, untuk membandingkan Bung Karno dengan seorang tokoh nasionalis besar lain di Asia Tenggara, yang memproklamkan kemerdekaan bangsanya hampir pada waktu yang sama dengan Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56: Ho Chi Minh. Sebagai seorang revolusioner kawakan dan serius, selain patriot, Paman Ho mencoba menjalankan sekaligus perang kemerdekaan dan satu revolusi dalam negeri.

Karena tahu bahwa yang kedua akan dibenci oleh Amerika, dia akhirnya berafiliasi dengan Uni Sovyet dan RRT. Revolusi itu toh jalan, tetapi bangsa dan negaranya pecah menjadi dua, dan baru bisa bersatu lagi 31

tahun belakangan, setelah dia sendiri sudah wafat, dan setelah pengorbanaan orang-orang Vietnam yang mahabesar, dan sekaligus mengerikan dan mengagumkan.

Pada tahun 1950-51, Bung Karno sudah berumur 50 tahun. Mungkin masa itu adalah puncak sebenarnya dari karir politiknya. Dia dihormati dan dicintai sebagai pemimpin yang bijaksana dan terbuka, dan sebagai seorang pejuang untuk bangsanya sejak masa mudanya. Tujuh tahun setelah itu dia nyaris dibunuh secara mengerikan dalam Peristiwa Tjiki-ni, oleh segerombolan kecil bangsanya sendiri. Menyusullah banyak usaha lain untuk membunuhnya, dan akhirnya dia didongkel dari jabatannya dan kekuasaannya oleh segerombolan lain bangsa *dhewe*. Nampaknya pada akhir tahun 1950an, dia mulai juga dibenci. Apa pasalnya?

Memang, manusia seolah-olah ditakdirkan akan kekurangan ide baru dan kesegaran/keluwesannya dalam proses menua. Bung Karno tak terkecuali. Dalam 19 tahun terakhir kekuasaannya, dia banyak mencipta semboyan baru dan gagasan baru, tetapi hampir semuanya bisa dikatakan reformulasi dari pikiran-pikiran masa mudanya. Kutipan-kutipan dari karangan tokoh-tokoh politik dan intelektual internasional masih menghiaskan pidatonya, tetapi kutipan ini bisa dibaca juga dalam pidato-pidato dan karangan-karangannya dari masa 20 tahun sebelumnya. Bung Karno rupanya tak ada waktu lagi (dan mungkin tak ada *interest*) untuk baca lagi. Dan apakah dia pernah baca buku-buku Pramoedya Ananta Toer atau puisinya Chairil Anwar? Sementara dunia dan pikiran manusia selalu berubah terus.

Bisa diduga bahwa lama-lama dia juga ditelan oleh jabatannya. Dalam album historis yang berjudul *Lukisan Revolusi*, terdapat banyak foto Bung Karno yang memilukan. Setelannya selalu neces tetapi sederhana, dan tidak jauh dari pakaian menteri-menterinya (walaupun mereka juga kadang-kadang masih memakai celana pendek). Ketika itu dia benar-benar pemimpin revolusi kemerdekaan. Foto-foto ini jauh berbeda dari figur publik Bung Karno pada masa Demokrasi Terpimpin. Di era itu, ia biasanya nampak dalam setelan perlente setengah berbau jendral, dengan selusin medali di atas dadanya, dan kacamata hitam yang besar pada mukanya, pun pada senja hari. Sehingga menjadi sasaran mudah untuk karika-

turis-karikaturis jahil di luar negeri yang menyamaratakannya dengan jenderal-jenderal reaksioner pimpinan kup di Amerika Latin. Mirip juga Marsekal Tito, dan jauh sekali dari Paman Ho. Ketika itu dia sudah menjadi Pemimpin Besar Revolusi.

Menjadi Presiden — jabatan yang tanpa preseden dalam sejarah Indonesia, apalagi tradisi kuat mengenai kewenangannya. Bung Karno sendiri tak ada pengalaman yang betul-betul mempersiapkannya. Sama sekali tidak ada pengalaman administratif. Tak pernah berpengalaman sebagai anggota badan legislatif. Dan bersentuhan dengan kehidupan anggota organisasi politik, seperti partai, serikat buruh, badan perjuangan, dan lain-lainnya cuman sepintas lalu. Mungkin juga dia tidak punya bakat atau perhatian untuk aktivitas-aktivitas semacam ini, yang pada umumnya di dunia modern menjadi latar belakang dan pengalaman seorang Presiden. Karena ini semua, jabatan Presiden di Indonesia pada semulanya tidak punya fungsi dan batas yang jelas dan yang diterima semua orang warganegara.

Apalagi karena jeleknya Undang-undang Dasar 1945 yang dibikin secara bergegas-gegas di bawah pengawasan kediktaturan militer Jepang, dan dalam beberapa aspek dipengaruhi oleh konstitusi Tiongkok masa Sun Yat-sen/Tjiang Kai-sjek. Ini semuanya membuka kesempatan untuk satu sinkretisme yang lama-lama berbahaya. Fungsi kepala negara – setaraf dengan Ratu Elisabeth dicampuradukkan secara gampang dengan fungsi pemimpin atau tokoh nasional setaraf dengan Winston Churchill atau Mahathir bin Muhammad. Dengan demikian, kewibawaan sering dikacaukan dengan kekuasaan, dan lama-lama yang kedua melebihi yang pertama. Apa yang tidak boleh untuk Kepala Negara boleh saja untuk Bapak Bangsa.

Dan pada bagian terakhir dari masa jabatannya terasa juga bahwa pengaruh samar-samar dari tradisi kerajaan-kerajaan Jawa membesar. Bukan hanya dengan makin bertambah upacara-upacara negara yang megah-megahan. Seorang raja adalah manusia unik sebagai penerima wahyu dari Tuhan/Dewa. Sama sekali bukan *primus inter pares*. Dan kalau wahyu tetap bersamanya, si raja dengan sendirinya akan menjadi raja seumur hidup. Pada zaman revolusi, Bung Karno masih disayangi sebagai *primus inter pares*. Tetapi lama-lama kebanyakan kawan seperjuangan dan seangkatan disisihkannya atau menyisihkan diri. Dan, malangnya, pada akhirnya dia

sampai bersedia diangkat sebagai Presiden Seumur Hidup 100 persen di luar UUD 1945. Dengan demikian mungkin lonceng masa jayanya sudah berbunyi, karena seorang presiden seumur hidup tidak bisa diganti kecuali oleh Malaikat Jibril atau kekerasan manusia.

Dua kejadian kecil tetapi menarik menunjukkan keruwetan yang bisa timbul kalau Kepala Negara, Pemimpin Bangsa, dan Maharaja saling melebur. *Pertama*: Karena merasa diri sebagai bagian dari arus emansipasi manusia, tokoh-tokoh pergerakan angkatannya Bung Karno pada umumnya menjunjung tinggi (paling sedikit di depan umum) prinsip monogami, sebagai komitmen untuk meningkatkan martabat dan hak-hak kaum wanita sebangsa. Prinsip ini juga berlaku untuk sebagian besar politisi Muslim. Rasanya kalau seorang aktivis tahun 1930an mendengar ramalan bahwa kemudian hari Bung Karno akan beristeri empat, dia tidak akan percaya, malahan akan merasa tersinggung. Sebagai Presiden, Bung Karno meninggalkan norma lama ini, dan menjadi tokoh penting pertama yang berbuat begitu. Memang beristeri empat boleh menurut tradisi Islam, tetapi Bung Karno bukan seorang santri, dan di masyarakat umum, perkawinan-perkawinan ini diterapkan kepada tradisi poligami tanpa batas pada raja-raja. Ada yang mengutuk, ada yang senyum, ada juga yang masa bodo.

Kedua, dan ini pengalaman saya sendiri, pada tahun 1963, karena berbagai faktor termasuk panen yang gagal, kelaparan menjalar sebuas-buasnya di Jawa Tengah. Saya sendiri sering lihat orang mati atau setengah mati geleparan di trotoar jalan-jalan kota. Kepada bencana ini, Bung Karno menjawab dalam salah satu pidatonya, dengan mengajak orang-orang untuk makan tikus sawah — enak koq dan banyak zat baiknya. Ajakan ini diterima dengan sinis: tidak ada yang yakin bahwa tikus sawah sering masuk menu makanan di Istana Negara. Ketika itu, saya teringat pada ucapan Ratu Marie Antoinette di Perancis, sebentar sebelum Revolusi Perancis meletus. Ketika ada laporan bahwa rakyat sangat menderita karena harga roti melejit tinggi di atas kemampuan finansialnya, Sang Ratu menjawab dengan keluguan khas putri pingit bangsawan: Lho, kalau begitu kenapa mereka tidak makan kue lapis saja? Terasa Bung Karno sudah jauh dari kehidupan sehari-hari rakyat jelata.

Dan nasionalismenya Bung Karno? Rasanya tidak ada seorangpun yang

akan menyangkal bahwa nasionalismenya Bung Karno mendalam, kuat, dan berapi-api. Tetapi nasionalismepun tidak luput dari Batara Kala dan keadaan yang berubah tanpa berhenti. Pada masa mudanya Bung Karno, sebagian besar manusia di Nusantara masih hidup dalam permukiman desa/kampung tradisional. Sebagian yang sama besarnya masih buta huruf, dan dibesarkan oleh kebudayaan lisan yang lokal. Jarang seorang Kalimantan Timur akan punya teman seorang Aceh, apalagi kawin dengan saudaranya. Jadi tujuan utama dakwaan nasionalis pada masa itu adalah untuk menyadarkan orang, dari Sabang sampai ke Merauke, bahwa mereka adalah orang Indonesia. Tanpa kesadaran itu, dan pergerakan nasional yang timbul karenanya, penjajahan Belanda tidak bisa dihantam sampai habis. Puluhan pemberontakan lokal selama periode 1825-1910 semua dihancurkan oleh kekuatan bersenjata Belanda (dimana cukup banyak orang pribumi punya andil). Tanpa kesadaran itu, birokrasi kolonial (yang personilnya pada tahun 1930an 90 persen pribumi) akan tetap patuh-utuh. Bung Karno mengerti masalah itu, dan berjuang sekuat tenaganya untuk menyebarkan kesadaran nasional, yang landasannya adalah persatuan bangsa. Orang-orang sadar akan bisa mengatasi semua prasangka dan kecipikan yang diwariskan kepadanya.

Orang Batak yah Indonesia, orang Hindu Bali yah Indonesia, orang Kaharingan yah Indonesia, orang Tionghoa yah Indonesia, dan orang Jawa pun harus sama. Perlu diperhatikan bahwa nasionalisme ini berupa suatu komitmen dalam tindakan, bukan cuman identitas baru. Umpamanya, justeru karena Batak Protestan dan Padang Islam jauh berbeda dan secara tradisional malahan kadang-kadang bermusuhan, sekarang harus ada komitmen oleh seorang nasionalis Padang untuk memperlakukan orang Batak Protestan sama dengan sesama Padang. Dan, tentu, sebaliknya.

Perjuangan Bung Karno dan angkatannya berhasil secara gemilang. Budi Utomo yang terlalu berbau Jawa lama-lama habis. Jong Java, Jong Ambon, Jong Islamieten Bond (yang sebenarnya bisa dijulukkan Jong Minangkabau) hilang atau meleburkan diri dalam Indonesia Muda. Organisasi politik yang bersifat suku tak pernah hidup subur di bawah pengawasan Bendera Merah-Putih-Biru.

Tetapi bagaimana setelah Indonesia menjadi anggota PBB, dan imperial-

isme Belanda sudah kapok? Dengan habisnya beban dan ancaman Belanda ini, orang Indonesia bisa membuat aturan rumah tangga sendiri dan saling menghadapi pada setiap tingkat masyarakat. Dengan meminjam dari kata-kata Bung Hatta, di samping persatuan juga ada persatean. Tentu saja masalah ini tak luput dari perhatian Bung Karno, apalagi karena negara baru ini langsung mengalami beberapa pemberontakan di daerah yang hampir semuanya dipimpin oleh orang-orang yang dulu ikut pergerakan nasional atau Revolusi.

Yang menarik adalah cara-cara yang dipakai Bung Karno untuk mengatasi problem pasca-kemerdekaan ini, yang menurut hemat saya, lebih berlandaskan pengalaman lama dan interpretasinya terhadap peranan-ganda diri sendiri, daripada refleksi yang mendalam terhadap situasi baru. Cara-cara ini bisa secara gampang dibagi tiga.

Yang *pertama* adalah menekankan perlunya nasionalisme persatuan bangsa gaya lama untuk menghadapi bahaya dari luar: Belanda, Inggris, Amerika dan, dalam taraf lebih kecil, Malaysia. Bahwa bahaya macam ini, dalam batas tertentu, dan dalam kasus-kasus tertentu memang ada, tak tersangkal. Tetapi kalau DI dan RMS dikatakan cuman boneka Belanda, dan PR-RI-Permesta cuman bonekanya Inggris dan Amerika, itu berarti menutup mata terhadap ketidakpuasan-ketidakpuasan kongkrit kelompok-kelompok besar dari bangsa Indonesia terhadap *beleid* pemerintahnya. Ikut pemberontakan bersenjata bukan suatu keputusan yang enteng, karena tentunya penuh risiko yang berat. Dan kalau pemberontak-pemberontak tertentu memang menerima senjata dan latihan dari orang asing, hal yang sama berlaku untuk pusat. Ribuan perwira angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dan polisi dilatih di luar negeri,

Dan persenjataan dan alat-alat perang hampir semuanya didatangkan dari AS, US, dan lainnya. Terlalu cepat mengecap lawan politik sebagai pengkhianat atau boneka bukan hanya membuat penyelesaian yang baik lebih sulit, tetapi juga, sebenarnya, mengurangi meluasnya nasionalisme. Tidak lagi semua orang Indonesia menjadi orang Indonesia. Persatean, memang,

Yang *kedua* dan *ketiga* sebenarnya bertalian secara semu. Pada tahun 1950an, paling sedikit sebelum Peristiwa Tjikini, Bung Karno rajin me-

ngunjungi daerah-daerah yang sebelum itu belum dilihatnya dengan mata sendiri. Jadi langsung merasakan majemuknya dia punya bangsa. Lagipula dia tahu betul bahwa di negaranya tidak ada mayoritas apapun, dari sudut suku, ideologi, ibu-bahasa, ataupun komitmen agama. (Hasil pemilu 1955 membuktikan realitas itu). Timbullah masalah konkrit yang ruwet: Bhinneka dicocokkan dengan Eka bagaimana, tanpa merusak kedua-duanya?

Logika realistik dan perkembangan-perkembangan di negara-negara lain yang besar dan sangat majemuk seharusnya meyakinkan Bung Karno bahwa sebaiknya Indonesia Merdeka menjadi negara federal. Amerika Serikat dari tanggal kelahirannya, Brasil setelah penghapusan monarki pada akhir abad ke-19, Nigeria setelah horor perang Biafra, Jerman pada masa demokrasi Weimar dan setelah hancur di Perang Dunia ke-II, India Kecil (yang masih raksasa) setelah merdeka, Yugoslavia pada masa kuasanya si Marsekal yang gendut dan lihai itu. Seandainya Bung Karno hidup sampai masa kini, dia akan lihat Spanyol menjadi negara federal, Rusia juga sampai batas tertentu. Sri Lanka mengarah ke situ, malahan Perancis yang tradisi sentralismenya kuat sekali terpaksa membuka jalan untuk otonominya pulau Korsika. Hanya di RRT gagasan federal ditolak mutlak, dengan masalah di Tibet, Sinjiang, dan Taiwan yang sulit diselesaikan dengan baik.

Bentuknya federalisme ada macam-macam. Komponen-komponennya bisa disadarkan atas dasar tradisi administratif melulu tanpa menghiraukan masalah suku dan agama. Pola ini diwakili dengan baik oleh Amerika Serikat. Dalam hal ini Arizona pada prinsipnya mirip Nusa Tenggara Barat, dan Texas Sumatera Timur. Bisa juga di atas konsentrasi permukiman-permukiman suku, bahasa dan agama seperti di Nigeria (mirip Sumatra Barat dan Bali). Bisa juga, seperti di India Kecil suatu kombinasi antara kedua prinsipnya.

Bagusnya sistem federal ialah bahwa konflik-konflik dalam negeri, yang kadang-kadang sangat sengit, tidak dipaksa selesai, pada tingkat pusat/nasional dengan kemenangan mutlak salah satu blok. Sistem federal dus membantu meredakan ketegangan-ketegangan, kecemasan-kecemasan, dan suasana pejah gesang. India, yang sejak Partition yang berlumuran darah itu di 1947-48, cukup stabil, tak pernah mengalami kup atau pemberontakan yang sangat serius. Bertahun-tahun orang Komunis memer-

intah negara bagian Kerala dan Bengal; orang-orang setengah fasis lama dominan di Bombay; setiap sukubangsa yang besar punya negara bagian sendiri dengan otonomi yang berarti untuk mengurus rumah tangga sendiri. Sistem ini menjadi berakar di bawah pimpinan berkaliber internasional Jawaharlal Nehru, yang juga aktif memimpin Partai Kongres yang besar dan mencakupi banyak kepentingan. Birokrasi nasional yang kuat, warisan imperialisme Inggris, juga menjadi faktor kestabilan.

Dan Bung Karno? Dia menolak segala macam federalisme dan aktif ikut menghancurkan Negara Indonesia Serikat yang didirikan setelah Konferensi Meja Bundar. Tentunya tidak tanpa alasan (jangka pendek). Selama periode 1946-49, Belanda mendirikan banyak negara-negara federal (yang sering diketuai oleh pemimpin feodal setempat, atau orang yang kolaborator) untuk mengimbangi Republik Yogyakarta, dan, kalau bisa, menghancurkannya. Karena itu, kata federalisme bernuansa jelek di kuping banyak orang Indonesia, dan sebagian besar pemimpin nasional alergi terhadapnya. Sayang sebenarnya.

Seperti dikatakan di atas, sebagian besar pemberontakan pasca-1950 dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dulu ikut pergerakan nasional dan Revolusi. Diantaranya hanya Republik Maluku Selatanlah yang bersifat separatis. Seandainya suatu sistem federal yang masuk akal sehat diterapkan secara sungguh-sungguh, mungkin sekali kebanyakan pemberontakan ini tak perlu jadi. Bukan itu saja, kita bisa membayangkan PKI memerintah di negara bagian Jawa Tengah, Masyumi di Sumatera Barat, Parkindo di Tapanuli Utara, NU di Jawa Timur, Partai Katolik di Flores, PNI di Bali, dan Partai Aceh di Aceh – dengan kesempatan untuk belajar bertanggung-jawab dan juga menunjukkan ke negara bagian lain di Indonesia kira-kira bagaimana masyarakat akan maju di bawah naungannya. Tapi supaya sistem federal macam ini berhasil, harus ada pungutan suara yang bebas setiap tiga atau empat tahun; dan otonomi negara bagian harus dijamin sepenuhnya di Undang-Undang Dasar. Juga supaya Si Eka sama kuat dengan Si Bhinneka, — sebaiknya diusahakan pembentukan partai besar dan majemuk (a la Partai Kongres) yang langsung dipimpin sehari-hari oleh si Bapa Bangsa.

Seandainya Bung Karno bersedia memimpin PNI secara langsung dan tur-

ba berpartisipasi dalam pemilihan umum 1955, bisa diduga dia akan menarik mayoritas suara. (Putrinya saja bisa mendapat sepertiga *koq*). Tetapi Bung Karno memutuskan lain. Walaupun dibelakang layar dia menyokong dan memakai PNI pada tahun 1950an, dia tidak mau terikat ketat oleh organisasi atau lembaga apapun juga. Dia ingin menjadi pemimpin besar seluruh rakyat Indonesia bukan hanya mayoritasnya. Padahal ini satu impian saja. Dan Dewi Sejarah cukup membuktikannya pada kemudian hari. Dari sudut tertentu boleh dikatakan bahwa dengan demikian Bung Karno mengelak sebagian tanggung-jawab seorang pemimpin besar.

Tetapi dan ini cara *ketiga* – di lain pihak Bung Karno berusaha dengan caranya sendiri supaya beberapa fungsi federalisme berjalan, khususnya dalam hal keamanan minoritas-minoritas yang relatif kecil. Tanpa prasangka rasial, dia mencoba memberi tempat yang sewajarnya kepada orang-orang Tionghoa dalam lembaga-lembaga politik sampai tingkat menteri; dia merestui dan membela Baperki yang ingin supaya orang Tionghoa diterima sebagai sukubangsa biasa di antara sekian sukubangsa di Indonesia. Minoritas Hindu-Bali, Protestan, Katolik dan Kepercayaan juga dilindungi dan dikasih angin. Tetapi justeru itu masalahnya: Mereka harus dilindungi, tidak punya hak langgeng sendiri. Mereka harus bergantung kepada Yang Paduka Mulia. Artinya dilindungi bukan oleh hukum atau UUD, tetapi oleh pribadinya Bung Karno yang bagaimanapun pada suatu hari akan dipanggil oleh Penciptanya. Lantas akan dilindungi apa dan siapa selanjutnya?

Mengapa begitu? Tentu saja banyak faktor main peranan termasuk alergi terhadap federalisme akibat *beleid* Belanda, dan pengaburan fungsi-fungsi kepala negara-pemimpin besar-maharaja. Tapi mungkin yang paling dasar ialah bahwa dia telah menjadi korban dari masa lalunya yang gemilang itu. Setelah merdeka Indonesia memerlukan kepemimpinan baru dan nasionalisme gaya baru. Mungkin justru suksesnya pada zaman lalu menjadikan Bung Karno melupakan hal itu.

Pola yang sama bisa dilihat dari sikapnya Bung Karno terhadap revolusi. Dalam kondisi penjajahan Belanda, dan dengan konsep-konsep Lenin yang dipegangnya yaitu bahwa negara-negara jajahan justru menjadi anak rantai yang lemah dalam sistem imperialisme global, konsep revolusi

bisa diartikan sebagai: rakyat bersatu untuk menghancurkan penjajahan Belanda dalam kerangka emansipasi bangsa Asia-Afrika malahan dunia seluruhnya. Yang disebut Revolusi Indonesia ada keberhasilan besar dalam kerangka ini. Karena itu, pada tahun 1950 Bung Hatta mengatakan bahwa revolusi [nasional] sudah selesai. Tetapi Bung Karno tidak demikian. Dia sangat bangga atas Revolusi Indonesia dan tak ingin revolusi masuk kotak sejarah di Indonesia.

Lantas apa? Warisan Lenin dari masa kecilnya mendorongnya untuk bergerak menyumbang kepada pergerakan emansipasi di seluruh dunia. Tapi tanpa pedoman yang kukuh dan konsisten. Untuk suatu waktu dia menjadi tokoh terkenal dari grup netral-bebas di antara blok Amerika dan blok US-RRT. Dus di tengah negara-negara kontrarevolusioner dan revolusioner. Kawannya memang pada zaman penjajahan menjadi orang berani. Tetapi selanjutnya? Nasser dan Nkrumah membikin kediktaturan berkultus individu yang gila-gilaan, menteror lawannya dan akhirnya masing-masing mati putus asa dan jatuh untuk selamanya. U Nu juga bikin kultus individu, memporandakan ekonomi dan sistem politik di Birma dan akhirnya digulingkan tentara. Kegagalan Marsekal Tito sudah bisa diduga sebelum dia wafat, padahal dia satu-satunya tokoh yang pernah revolusioner dalam arti sepenuhnya.

Setelah itu Bung Karno mengeluarkan konsep Nefos melawan Oldefos dan poros Pyong Yang-Peking-Hanoi-Pnomh Penh-Jakarta. Yang pertama menjadi cucu Lenin, tetapi karena dunia sudah lain, tak banyak digubris. Yang kedua tak ada hubungan dengan Lenin dan menunjukkan bahwa dunia global masa muda Bung Karno sudah menciut ke batas Asia Timur dan Tenggara. Juga tanpa hasil yang nyata: Asia Timur Raya tanpa Jepang? Merasa sudah menjadi seorang tokoh internasional (benar), Bung Karno meyakinkan diri bahwa Indonesia bisa menjadi pemain revolusioner pada tingkat internasional juga (salah). Menghadapi raksasa Jepang, RRT, Eropa, Amerika, dan Uni Soviet — daripada Belanda yang cilik itu ternyata bangsa Indonesia yang miskin dan Negara Indonesia yang kekuatan bersenjataanya bergantung kepada negara-negara asing tidak bisa banyak berkutik. Sementara itu, Jose Ramos Horta dan kawan-kawannya di Timor Timur, yang menaruh banyak harapan atas bantuan Bung Karno untuk mendirikan negara merdeka lepas dari cengkeraman kediktaturan

setengah fasis Antonio Salazar tak diperhatikan.

Revolusi dalam negeri? Untuk Bung Karno ide ini pada dasarnya rada sulit. Revolusi macam itu tak pernah terjadi tanpa pertumpahan darah antara sesama bangsa, karena berarti dijatuhkan kelas penguasa oleh orang bawah, dan usaha-usaha kearah itu akan selalu menghadapi perlawanan sengit. Revolusi Besar Inggris pada abad ke-17, Revolusi Besar Perancis pada abad ke-18, Revolusi Besar di Rusia Lama dan di Tiongkok pada abad ke-20: korban-korban di kedua belah pihak sulit terhitung jumlahnya. Perang saudara macam ini, rasanya, justru bertentangan dengan nasionalisme sinkretis Bung Karno, apalagi keperi-kemanusiaannya.

Tidak bisa dikatakan bahwa Bung Karno tidak berbuat apa-apa untuk merombak struktur sosial-ekonomi masyarakat. Tetapi pada umumnya usaha ini gagal, diantaranya karena kurang bijaksananya presiden sendiri, dan akhirnya justru menjadi bumerang. Menasionalisasikan semua perusahaan Belanda pada akhir tahun 1957, ketika Indonesia sudah berada di bawah SOB, selain dilaksanakan dengan gegabah dan tanpa perencanaan yang memadai, berakibat bahwa sektor ekonomi yang paling maju mau tidak mau jatuh ke tangan angkatan darat. Kemudian sarekat-sarekat buruh di sektor ini dilumpuhkan oleh majikan-majikan baru; perusahaan-perusahaan nasional biasanya salah urus sehingga produktivitasnya jatuh seperti batu yang dilemparkan ke dalam air, belum terhitung penjarahan diam-diam terhadap aset-asetnya oleh banyak perwira yang tidak beres. Bencana ekonomi Indonesia tahun 1960an, sebenarnya mulai pada Desember 1957. Tapi seandainya program nasionalisasi dikerjakan berangsur-angsur dan terencana pada jaman demokrasi liberal, apakah efeknya akan begituan?

Undang-undang Agraria dan Bagi Hasil cetakan tahun 1960-61 punya target yang baik: menghapuskan tuan-tuan tanah, membagi-bagi tanah lebih kepada buruh tani, dan memaksakan pembagian hasil panen yang fair antara pemilik dan penyewa tanah. Tetapi tanah-tanah lungguh, sisa zaman feodal, yang sangat luas dikecualikan; juga tanah-tanah milik lembaga agama. Cukup banyak orang yang punya tanah lebih memindahkannya ke lembaga waqaf ini (sering mereka sendiri menjadi pengurusnya), dan di tengah krisis agraria yang berat sekali, identifikasi tanah

luas dengan lembaga agama (baik Islam maupun Kristen dan Hindu-Bali) menjadi-jadi secara berbahaya. Waktu penetapan undang-undang ini juga kurang diperhatikan.

Ketika itu inflasi melejit di luar kontrol pemerintah, dan harga uang rupiah menurun dari minggu ke minggu; orang-orang tak percaya lagi kepadanya dan melarikan diri ke barang, diantaranya tanah. Gejala ini sangat menonjol di kalangan atas birokrasi, khususnya di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria, Kejaksaan, Polisi, dan Tentara. Pada akhirnya timbul kampanye aksi sepihak PKI yang gagal, dan suasana tegang yang mencekam di dunia perdesaan. Pembantaian massal tahun 1965-66, dimana puluhan ribu orang sipil ikut menjadi algojo tidak bisa dijelaskan tanpa memikirkan akibat sosial, ekonomi, dan psikologis dari suatu reforma agraria yang dilaksanakan dalam keadaan dimana inflasi tak terkontrol lagi, dan SOB masih berlaku. Tetapi seandainya dicoba pada zaman parlementer yang relatif stabil, bagaimana?

Perlu juga digarisbawahi bahwa berkumandangnya retorika revolusioner yang berkobar-kobar tanpa *beleid* yang praktis, kongkrit dan berpandangan jauh untuk melaksanakannya, mirip tancap gas tanpa masuk persneling. Mesinnya jadi panas, mobil tidak jalan. Pada masa akhir Demokrasi Terpimpin, suasana makin panas di Indonesia, tetapi roda sedan merk Kemajuan apalagi merk Revolusi justru macet. Dan kontras yang menyolok ini berangsur-angsur menggerogoti kewibawaan Bung Karno. Untuk golongan yang prorevolusi timbul banyak frustrasi, dan di kalangan yang anti, momok revolusi itu makin menimbulkan kecemasan dan kemarahan. Apakah Bung Karno betul-betul mengerti situasi yang demikian? Pertanyaan yang sulit dijawab. Sulit juga untuk menghindari kesimpulan bahwa kalau Bung Karno menjadi seorang pemimpin besar pada masa Revolusi Kemerdekaan yang meletus dari bawah secara spontan di luar perhitungan elite Pergerakan, dia tidak bisa dikatakan seorang Pemimpin Besar Revolusi.

Dalam uraian yang kelewat panjang ini, diusahakan untuk mencoba mengerti Bung Karno sebagai makhluk masanya, sesuatu masa yang sudah lama lewat. Bukan untuk memuji-mujinya ataupun untuk memaki-makinya. Bapak Bangsa Indonesia sekarang kebal terhadap pujian dan makian

manusia. Dia dibentuk oleh kelahirannya, pendidikannya, sejarah Hindia Belanda, dan sejarah dunia modern. Juga oleh pengalaman-pengalamannya di masa mudanya, baik yang menggembirakan maupun yang menyakitkan. Tetapi semua faktor-faktor ini pada akhirnya tidak bisa menjelaskan mengapa si lulusan HBS dan ITB kolonial memutuskan menjadi pejuang bangsa (pada ketika negara kolonial Belanda begitu kuat dan seolah-olah langgeng) daripada jadi seorang arsitek profesional yang tenang dan berada.

Setelah horor-horornya Orde Babibuta, mungkin terlalu mudah dikatakan bahwa bagaimanapun juga Bung Karno tak pernah disiksa, isterinya tak diperkosa, dan anak-anaknya tak diisolasi dari masyarakat sebagai anak-anak haram politik. Barang miliknya juga tak dirampas. Toh dia dipantau, diancam, difitnah, ditertawakan, diadili di depan semacam Mahmilub kolonial, dan kehilangan kebebasannya selama hampir sepuluh tahun. Seandainya Jepang tidak mengalahkan Belanda, masa tahanan itu mungkin berlangsung sampai masa tuanya. Dia cinta pada bangsanya yang sangat majemuk yang dia sendiri ikut bentuk. Lebih dari setiap orang lain dari angkatannya, dia mampu menyebarluaskan kesadaran nasional dan cita-cita kemerdekaan sampai kepada rakyat gembel. Hubungan yang begitu erat dengan bangsanya, ditambah sekian bakat lainnya, berakibat bahwa, pada masa Proklamasi, tidak ada lain pribumi yang masuk di akal sebagai kepala negara yang pertama. Dia memang dicintai.

Sebagai pemimpin gerakan untuk mencapai kemerdekaan, dia berhasil secara gemilang. Tetapi sebagai pemimpin negara pasca-kemerdekaan, harus diakui, bahwa dalam banyak hal dia gagal. Demokrasi Terpimpinnya runtuh menjadi puing-puing dan dia sendiri mengakhiri usianya di tahanan. Dalam hal ini dia tidaklah unik. Banyak sekali pahlawan pergerakan kemerdekaan juga gagal ketika menjadi presiden atau perdana menteri setelah kemerdekaan tercapai: U Nu, Nasser, Sekou Toure, Nkrumah, Bandaranaike, Mugabe, Arafat, Kim Il Sung, Kaunda, dan sebagainya. Sun Yat-sen pun gagal. Kalau Gandhi tak dibunuh dan sempat menjadi Kepala Negara, apakah dia akan sukses? Belum tentu. Apakah Ho Chi Minh bisa membayangkan bahwa 33 tahun setelah matinya, Vietnam akan dinilai nomor satu atau nomor dua di dunia dalam korupsi yang menjalar kayak kanker? Tantangan periode ini lain lagi dari periode heroik sebelumnya.

Dan dunia juga berubah dengan kecepatan yang membingungkan.

Dalam semua ini apakah ada pelajaran-pelajaran yang berguna untuk masa kini? Mungkin ada dua. *Pertama*: bahaya pemfosilan. Kalau ada yang benar dalam analisa di atas, bisa disimpulkan bahwa proses pemfosilan dalam kasus pikiran dan sikap Bung Karno sebenarnya mulai pada dirinya sendiri setelah Indonesia menjadi Merdeka dan dia menjadi presiden. Berangsur-angsur tentunya. Setelah wafatnya, pemfosilan ini malahan menjadi-jadi dalam suasana penuh bau kemenyan. Kesimpulan ini sama sekali tidak berarti bahwa secara total pandangan-pandangan dan nilai-nilai Bung Karno sudah usang; cuman berarti bahwa pikiran-pikiran itu perlu direnungkan dengan sikap yang kritis (bukan anti), dan berkesadaran historis atas jarak jauh antara masa kini dan masa Bung Karno. Borobudur, candi/stupa Budha yang terbesar dan mungkin terindah di dunia, kini menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Tapi masyarakat Indonesia sekarang bukan masyarakat yang beragama Budha. Agama Borobudur, yang mendorong pencipta-penciptanya, tak banyak digubris lagi, tetapi kemegahan, kecantikannya, serta suasana khidmatnya masih merangsang.

Menilai karangan-karangannya Bung Karno sebagai Kitab Suci atau Wejangan Leluhur yang Keramat akan memustahilkan pikiran yang jitu dan mendalam terhadap masalah-masalah Indonesia sekarang ini: seperti keadilan sosial pada zaman globalisasi dan komputerisasi; federalisasi yang sehat supaya si Bhinneka dan Si Eka tak saling menerkam; alternatif kepada kebrutalan neoliberalisme, cengkeraman konglomerat-konglomerat transnasional dan nihilisme Hollywood; penghancuran terhadap alam; keamanan minoritas-minoritas; hak-hak manusia dan lebih lagi hak-hak warga negara Indonesia; pengeroposan total di bidang hukum, dan banyak lain. Terhadap sebagian besar masalah ini, tidak tertemu jawaban apa-apa dalam Wejangan Bung Karno. Masanya begitu lain.

Kedua: dari Bung Karno dan zamannya kita bisa menggali kembali bibit gagasan penting tentang nasionalisme, bukan sebagai warisan nenek moyang tetapi sebagai komitmen untuk masa sekarang dan masa depan. Memang dia sering bicara secara gampang tentang 350 tahun penjajahan Belanda, walaupun sadar betul bahwa Aceh dan Bali Selatan dan sebagian Sulawesi Selatan belum ditaklukkan ketika dia lahir. Mungkin de-

ngan kata-kata demikian dia ingin membuat pendengar-pendengar merasa malu, dan karena malunya itu lalu berbangkit. Dia juga mengetahui bahwa pun Kartini belum sempat merasa diri seorang manusia Indonesia ketika dia mati terlalu muda. Angkatan Bung Karnolah yang pertama yang membayangkan diri sebagai orang Indonesia.

Dus, menjadi orang Indonesia bukan suatu yang alamiah, tetapi sesuatu yang modern, yang memerlukan tekad, solidaritas, kerelaan berkorban, dan harapan. Khususnya harapan. Manusia Indonesia yang dibayangkan oleh orang-orang Pergerakan adalah manusia yang berdiri tegak, tidak bongkok dan tidak menginjak, terbuka, dinamis, inklusif, bernyali, dan berperikemanusiaan. Manusia macam ini bukan suatu makhluk alamiah, tetapi harus digemblengkan, saban haripun, oleh dia sendiri dan sesamanya. Itulah kiranya pelajaran dari Bung Karno yang paling penting yang masih tinggal segar untuk bangsanya. Dan optimisme yang tak terputuskan, pun ditengah puing-puing.

Requiescat in pace, Bung Karno.***

Artikel ini sebelumnya telah muncul di laman indoprogress.com pada 8 Maret 2016: <http://indoprogress.com/2016/03/bung-karno-dan-bahaya-pemfosilan/>

Catatan Redaksi: *Tulisan ini nongol secara bergerilya di internet pada tahun 2003. Pengarangnya adalah Ben Anderson, yang menulis langsung dalam bahasa Indonesia gaya tahun 1950an. Dia menyoroti pribadi yang sangat dikenal dan dikaguminya: Bung Karno. Ketika tulisan ini ditulis, Indonesia dipimpin oleh Presiden Megawati Sukarnoputri. Tulisan ini menjadi catatan kritis Ben Anderson agar orang Indonesia tidak ‘memfosilkan ajaran-ajaran Bung Karno.’*

Biodata Penulis

Airlangga Pribadi Kusman adalah pengajar Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya.

Benedict Richard O’Gorman Anderson (alm.) adalah mantan Profesor Emeritus dalam Studi-studi Internasional, Pemerintahan dan Studi Asia di Cornell University, AS.

Bonnie Setiawan adalah Direktur Eksekutif di Resistance and Alternatives to Globalization (RAG) di Jakarta. Telah menerbitkan banyak buku di antaranya: Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga, Menggugat Globalisasi, Globalisasi Pertanian, dan bukunya terakhir adalah ‘Jaringan Rantai Kapitalisme Global.

Mastono adalah Mahasiswa Filsafat UGM dan Wakabid Kaderisasi GMNI, Yogyakarta

Max Lane adalah penulis terkemuka tentang masalah Indonesia dan Asia Tenggara dan juga penerjemah dari beberapa novel Pramoedya Ananta Toer, termasuk Tetralogi Buru yang diterbitkan oleh Penguin Books.

Rudi Hartono adalah Pemimpin Redaksi berdikarionline.com dan anggota Partai Rakyat Demokratik (PRD); fb.com:rudihartono2000 dan twitter:@hrudihartono.

